

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan di Kabupaten Demak.

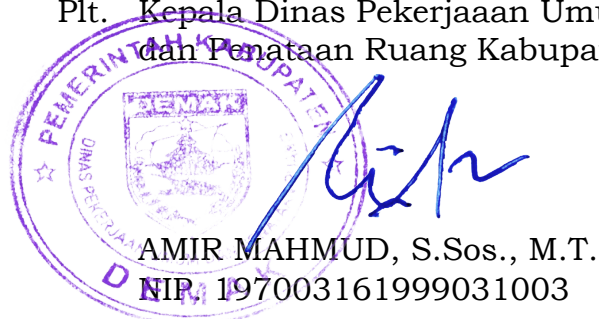
Renstra ini merupakan wujud komitmen kami untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, serta program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk internal dinas, instansi terkait, serta masukan dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi stakeholders. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan sinergi, kerja keras, dan dukungan semua pihak, kami optimis tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan Kabupaten Demak yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Demak, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Demak



AMIR MAHMUD, S.Sos., M.T.
NIP. 197003161999031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak maka Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pekerjaan umum, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus

melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.53406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

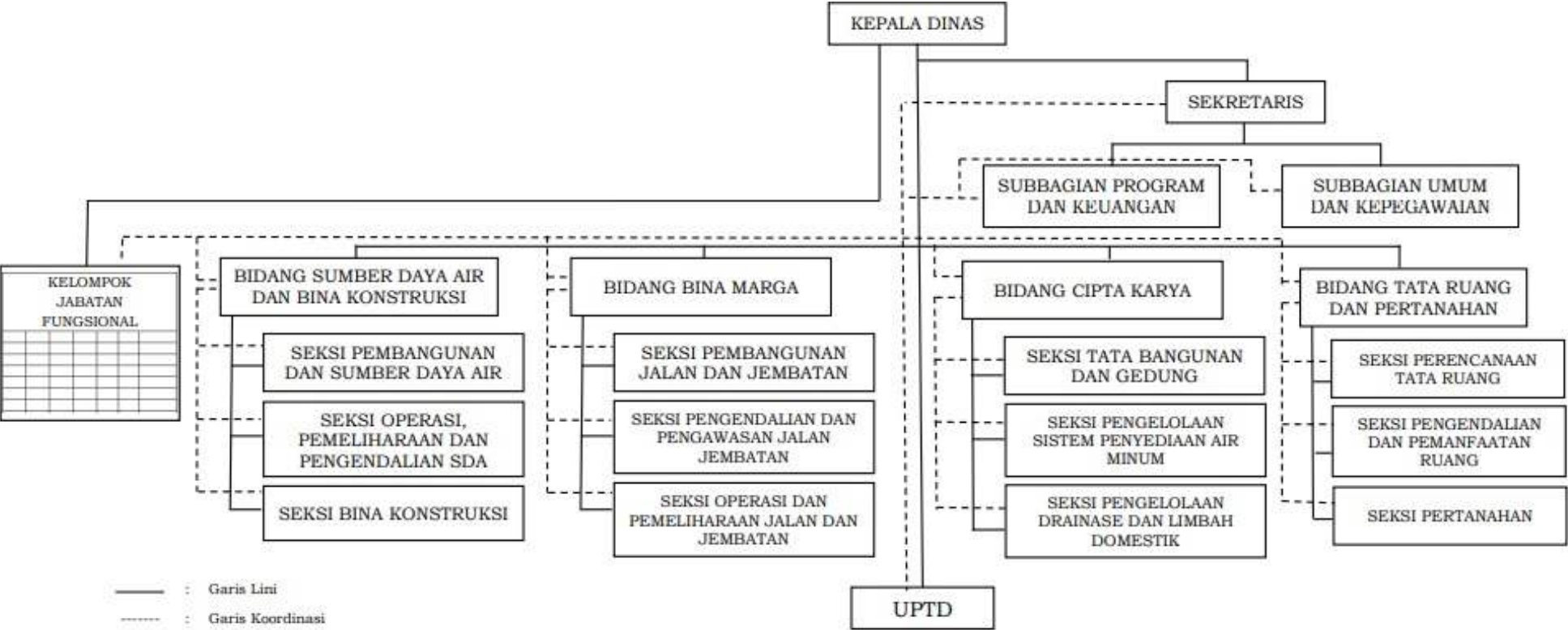
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah

Melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, yang membawahi:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Keuangan;

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan.

Adapun tugas dari Subbagian Program dan Keuangan meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Adapun tugas dari Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;

- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya air, operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air, serta bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembangunan sumber daya air;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bina konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan, serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan gedung, pengelolaan sistem penyediaan air minum, serta pengelolaan drainase dan limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan gedung;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan drainase dan limbah domestik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Mempunyai tugas melaksanakanbpenyiapan perumusan kebijakan, koordinasi danbpelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
 - d. pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan
 - e. pelaporan di bidang pertanahan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
 - g. Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam tabel 2. 1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	NonASN	Jumlah
----	--------------------	-----	------	--------	--------

		L	P	L	P	L	P	
1	SD	6	0	0	0	0	0	6
1	SMP Sederajat	10	0	0	0	1	2	13
2	SMA Sederajat	67	2	2	1	30	2	104
3	D3	1	0	3	1	0	0	5
4	S1	20	9	12	9	15	16	81
5	S2	1	2	0	0	0	0	3
6	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		105	13	17	11	46	20	212

Sumber: Data Kepegawaian DINPUTARU, 2025

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak terdiri atas 6 golongan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	46	20	66
2	PPPK	17	11	28
3	PNS Golongan I	4	0	4
4	PNS Golongan II	60	1	61
5	PNS Golongan III	40	10	50
6	PNS Golongan IV	2	1	3
Jumlah Total		176	43	219

Sumber: Data Kepegawaian DINPUTARU, 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.040	2003	Jl. Kyai Jebat No.35 Kel. Bintoro Demak	Hak Pakai	26/02/1985	A 1631777 (HP 26)	Tanah Bangunan	Pembelian	1.034.240	Bukti Sertifikat - Mutasi
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	797	2003	Puk Garuda Kel. Bintoro Demak	Hak Pakai	06/09/1989	B 8036086 (HP 42)	Tanah Bangunan	Pembelian	79.700	Puk Garuda Kel. Bintoro Demak
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.296	2003	Jl. Raya Demak Kudus Kel. Bintoro Demak	Hak Pakai	21/07/1988	B 8894526 (HP 39)	Tanah Bangunan	Pembelian	259.200	Rumah Dinas Kepala Dpuk
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.46	2003	Jl. Mijen Jepara	Hak Pakai	27/08/2020	11.09.11.0 8.4.00045	Tanah Bangunan	Pembelian	30.000	Tanah Dpuk Wedung
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	318	2003	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	Hak Pakai	26/02/1985	A 1631777 (HP 26)	Tanah Bangunan	Pembelian	40.704	Tanah Bangunan Gudang Pusat
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	32	2003	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	Hak Pakai	26/02/1985	A 1631777 (HP 26)	Tanah Bangunan	Pembelian	21.096	Tanah Bangunan Pusat
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.532	2003	Tanah Kantor Cab Din Demak	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.12.0 4.4.00253	Tanah Bangunan	Pembelian	76.700	Tanah Kantor Cab Din Demak
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.506	2018	Jl. Semboja	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.12.0 5.4.00122	Tanah Bangunan	Penguasaan	1.586.880	(Tanah Bong 1)
9	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	31.706	2016	Jalan Sultan Fatah	Hak Pakai	01/12/2021	11.09.12.0 4.4.00245 , 00057, 00060, . . .	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	36.366.209	Jalan Sultan Trenggono (Ruas 085)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
10	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.461	2016	Jl. Sultan Trenggono	Hak Pakai	01/12/2021	11.09.12.0 4.4.00246 , 00247, 00058, ...	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	8.839.557	Jalan Sultan Trenggono (Ruas 086)
11	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	27.813	2016	Jalan Sunan Kalijaga	Hak Pakai	01/12/2021	11.09.12.0 5.4.00333 , 00340,	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	12.905.000	Jalan Sunan Kalijaga (Ruas 087)
12	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.036	2019	Jalan Cempaka	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 3.4.00042, 11.09.12.0 3.4.00043	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.984.000	Jalan Kenanga (Ruas 082)
13	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.448	2020	Karangsari - Rejosari	Hak Pakai	18/02/2021	11.09.06.1 5.4.00006 , 00005, 00004	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	9.379.200	Jalan Wonoagung – Karangsari (Ruas 157)
14	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	31.656	2006	Wilalung - Luwuk	Hak Pakai	27/01/2021	11.09.06.1 5.4.00006 , 00005, 00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.025.984	Jalan Karanganyar – Merak (Ruas 033)
15	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	80.64	2008	Menco - Jetak	Hak Pakai	02/10/2021	11.09.14.0 8.4.00068 , 00067, 00066	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	2.177.280	Jalan Mijen – Menco (Ruas 013)
16	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.742	2009	Bedono - Purwosari	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.05.1 4.4.00021 , 00020, 00019	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.454.844	Jalan Bedono – Purwosari (Ruas 045)
17	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	63.72	2013	Dempet - Luwuk	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.08.1 8.4.00095 , 00096, 00097	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.720.440	Jalan Dempet – Luwuk (Ruas 008)
18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	35.681	2016	Jalan Sultan Hadiwijaya	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.0 4.4.00099, 00100, 00101, 00102	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	47.880.000	Jalan Sultan Hadiwijaya (Ruas 060)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
19	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.46	2016	Jalan Pemuda	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00106	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	18.321.442	Jalan Pemuda (Ruas 059)
20	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.932	2016	Jalan Kudus - Demak	Hak Pakai	12/01/2021	11.09.12.0 5.4.00334 , 00335, 00336	Tanah Jalan (Seksi 1)	Hibah	45.900.000	Jalan Kudus - Demak (Pati Unus) (Ruas 088)
21	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.374	2000	Jalan Pucang Gading Raya	Hak Pakai	12/07/2021	11.09.02.0 4.4.00171 , 000172, 000173	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	19.547.948	Jalan Pucang Gading Raya (Ruas 237)
22	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.4	2017	Krajanbogo - Donorojo	Hak Pakai	22/06/2020	11.09.13.0 6.4.00001, 11.09.13.0 6.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.260.000	Jalan Krajanbogo – Donorojo (Ruas 089)
23	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9	2017	Sukodono - Krajanbogo	Hak Pakai	18/02/2021	11.09.13.0 4.4.00146, 11.09.13.0 4.4.00147	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.080.000	Jalan Sukodono – Krajanbogo (Ruas 090)
24	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.4	2017	Jatimulyo - Sukodono	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.13.0 5.4.00133, 11.09.13.0 5.4.00134	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.088.000	Jalan Jatimulyo – Sukodono (Ruas 091)
25	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.91	2017	Krajanbogo - Karangmlati	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.13.0 5.4.00130	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	286.500	Jalan Krajanbogo – Karangmlati (Ruas 092)
26	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12	2017	Karangrejo - Gebang	Hak Pakai	12/03/2020	11.09.13.0 8.4.00011, 11.09.13.0 1.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	490.000	Jalan Karangrejo – Gebang (Ruas 093)
27	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	35.4	2017	Karangrejo - Tridonorejo	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.13.0 9.4.00006 ,11.09.13.0 9.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	8.850.000	Jalan Karangrejo – Gebang (Ruas 093)
28	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.4	2017	Poncoharjo - Serangan	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.13.1 6.4.00063 , 00064, 00065	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.350.000	Jalan Poncoharjo – Serangan (Ruas 094)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
29	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.34	2017	Karangmlati - Weding	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.13.1 9.4.00012 ,11.09.12.1 9.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.734.000	Jalan Karangmlati – Weding (Ruas 095)
30	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.8	2017	Poncoharjo - Wonosari	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.13.1 6.4.00054 ,11.09.13.1 6.4.00052	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	281.160	Jalan Serangan – Wonosari (Ruas 096)
31	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.5	2017	Wonosari - Poncoharjo	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.13.1 6.4.00047	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	310.200	Jalan Serangan – Wonosari (Ruas 096)
32	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.5	2017	Weding - Poncoharjo	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.13.1 6.4.00059 ,11.09.13.1 6.4.00061	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	708.000	Jalan Weding Poncoharjo (Ruas 097)
33	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.4	2017	Gebang - Gebangarum	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.13.0 8.4.00005 ,11.09.13.0 8.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	435.000	Jalan Gebang – Gebangarum (Ruas 098)
34	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10	2017	Kalikondang - Babadan	Hak Pakai	22/10/2020	11.09.13.0 3.4.00055 ,11.09.13.0 3.4.00057	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.500.000	Jalan Kalikondang – Babadan (Ruas 099)
35	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.5	2017	Serangan - Betahwalang	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.13.2 1.4.00004 , 00005, 00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.875.000	Jalan Serangan - Gojoyo (Ruas 100)
36	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.23	2017	Serangan - Ngojoyo	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.14.0 1.4.00011 ,11.09.14.0 1.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.734.500	Jalan Wedung – Seklenting (Ruas 239)
37	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.5	2017	Ngojoyo - Ruwit	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.14.0 1.4.00027 , 00028, 00029	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	635.375	Jalan Gojoyo Ruwit (Ruas 101)
38	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.5	2017	Harjowinangun - Kramat	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.08.2 9.4.00139	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.425.000	Jalan Harjowinangun – Kramat (Ruas 102)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
39	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19	2017	Kebonsari - Kramat	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.08.1 8.4.00072 ,11.09.08.1 8.4.00070	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	541.125	Jalan Kebonsari – Kramat (Ruas 103)
40	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.23	2017	Baleromo - Kramat	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.08.1 8.4.00085 ,11.09.08.1 8.4.00069	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	423.000	Jalan Kebonsari – Kramat (Ruas 103)
41	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9	2017	Baleromo - Kebonsari	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.08.1 8.4.00080 ,11.09.08.1 8.4.00078	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	427.000	Jalan Kebonsari - Kramat (Ruas 103)
42	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	22.8	2017	Baleromo - Jerukgulang	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.08.1 9.4.00010 ,11.09.08.1 9.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.420.000	Jalan Baleromo – Jerukgulang (Ruas 104)
43	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.2	2017	Kramat - Sidomulyo	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.08.2 4.4.00059 ,11.09.08.2 4.4.00054	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.920.000	Jalan Kramat – Sidomulyo (Ruas 105)
44	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6	2017	Sidomulyo - Gempoldenok	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.08.2 4.4.00064 ,11.09.08.2 4.4.00061	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	742.500	Jalan Kramat – Sidomulyo (Ruas 105)
45	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15	2017	Brakas - Kunir	Hak Pakai	12/10/2020	11.09.08.2 0.4.00006 ,11.09.08.2 0.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.250.000	Jalan Brakas Kunir (Ruas 106)
46	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6	2017	Kunir - Baleromo	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.08.1 8.4.00083 ,11.09.08.1 9.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.315.300	Jalan Kunir – Baleromo (Ruas 107)
47	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15	2017	Karangrejo - Mangunrejo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.15.0 7.4.00013 ,11.09.08.0 9.4.00144	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.750.000	Jalan Karangrejo – Mangunrejo (Ruas 108)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
48	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.5	2017	Dempet - Doreng	Hak Pakai	13/10/2020	11.09.07.0 2.4.00104, 11.09.07.0 2.4.00106	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.500.000	Jalan Dempet – Doreng (Ruas 109)
49	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10	2017	Jatisono - Kramat	Hak Pakai	11/02/2020	11.09.08.2 9.4.00118 ,11.09.09.0 2.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	890.625	Jalan Jatisono - Kramat (Ruas 110)
50	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.5	2017	Gedangalas - Kramat	Hak Pakai	10/05/2020	11.09.08.2 9.4.00100 ,11.09.09.0 5.4.00064	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	979.875	Jalan Gedangalas – Kramat (Ruas 111)
51	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12	2017	Botosengon - Kedungori	Hak Pakai	13/10/2020	11.09.08.2 6.4.00007 ,11.09.08.2 6.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.600.000	Jalan Botosengon – Kedungori (Ruas 112)
52	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6	2017	Kedungori - Baleromo	Hak Pakai	22/10/2020	11.09.08.2 6.4.00012 ,11.09.08.2 6.4.00008	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	720.000	Jalan Kedungori – Baleromo (Ruas 113)
53	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.5	2017	Kedungori - Munteran	Hak Pakai	13/10/2020	11.09.08.2 6.4.00004 ,11.09.08.2 8.4.00091	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	687.500	Jalan Kedungori – Munteran (Ruas 114)
54	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.145	2017	Kuwu - Kebonsari	Hak Pakai	22/10/2020	11.09.08.2 5.4.00119	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	246.675	Jalan Kuwu – Kebonsari (Ruas 115)
55	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.6	2017	Mojodemak - Kuwu	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.07.0 9.4.00008 ,11.09.07.1 0.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.690.000	Jalan Mojodemak – Kuwu (Ruas 116)
56	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9	2017	Gedangalas - Tlogopandogan	Hak Pakai	22/10/2020	11.09.09.0 6.4.00005 ,11.09.09.0 7.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	540.000	Jalan Gedangalas – Tlogopandogan (Ruas 117)
57	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.5	2017	Gajah - Sari	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.09.1 6.4.00025	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.450.000	Jalan Gajah – Sari (Ruas 118)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
58	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.5	2017	Sari - Gajah	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.09.1 4.4.00013 ,11.09.09.1 4.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.550.000	Jalan Wonoketingal – Banjarsari (Ruas 119)
59	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9	2017	Wonoketingal - Banjarsari	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.09.1 4.4.00003 ,11.09.09.1 4.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.700.000	Jalan Wonoketingal – Banjarsari (Ruas 119)
60	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12	2017	Sari - Tambirejo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.1 4.4.00017 ,11.09.09.1 4.4.00016	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.630.000	Jalan Sari – Tambirejo (Ruas 120)
61	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.5	2017	Tambirejo - Banjarsari	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.09.1 7.4.00007 ,11.09.09.1 7.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.500.000	Jalan Tambirejo – Banjarsari (Ruas 121)
62	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.5	2017	Tambirejo - Medini	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.1 0.4.00012 ,11.09.09.1 0.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.300.000	Jalan Sambung – Mlatiharjo (Ruas 122)
63	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.5	2017	Medini - Mlatiharjo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.1 0.4.00008 ,11.09.09.1 0.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	222.600	Jalan Medini - Mlatiharjo (Ruas 123)
64	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.5	2017	Sambung - Mlekang	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.09.1 2.4.00064 ,11.09.09.1 2.4.00066	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	427.500	Jalan Undaan Kidul – Mlekang (Ruas 124)
65	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.875	2017	Gedangalas - Wonosari	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.0 8.4.00010 ,11.09.09.0 6.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.187.500	Jalan Gedangalas – Banjarsari (Ruas 125)
66	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.5	2017	Gedangalas - Sambiroto	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.09.0 5.4.00070 ,11.09.09.0 5.4.00069	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.237.500	Jalan Gedangalas – Sambiroto (Ruas 126)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
67	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.2	2017	Gedangalas - Harjowinangun	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.08.2 9.4.00142 ,11.09.08.3 0.4.00147	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	495.000	Jalan Gedangalas Kramat (Ruas 111) -
68	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16	2017	Geneng - Gajah	Hak Pakai	03/12/2020	11.09.11.0 3.4.00004 ,11.09.10.0 1.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	4.800.000	Jalan Geneng – Ngaluran (Ruas 166)
69	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.4	2017	Jatirejo - Ngelowetan	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.11.0 3.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.080.000	Jalan Jatirejo – Ngelowetan (Ruas 127)
70	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.405	2017	Wonoketingal - Mlekang	Hak Pakai	02/12/2020	11.09.10.0 3.4.00041 ,11.09.10.0 3.4.00033	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.421.500	Jalan Wonoketingal – Mlekang (Ruas 129)
71	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	22.8	2017	Cangkring B - Mlatiharjo	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.10.0 5.4.00007 ,11.09.10.0 5.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.368.000	Jalan Cangkring – Cangkring Rembang (Ruas 130)
72	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.62	2017	Undaan Kidul – Lengkur Tuwang	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.10.0 6.4.00026 ,11.09.10.0 5.4.00022	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.486.000	Jalan Undaan Kidul - Lengkur Tuwang (Ruas 131)
73	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.37	2017	Undaan - Ketanjung	Hak Pakai	12/03/2020	11.09.10.0 9.4.00017 ,11.09.10.0 9.4.00024	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.511.000	Jalan Ketanjung – Karanganyar (Ruas 132)
74	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.5	2017	Undaan Lor - Wonorejo	Hak Pakai	12/10/2020	11.09.10.1 3.4.00024 ,11.09.10.1 3.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.150.000	Jalan Undaan Lor – Wonorejo (Ruas 133)
75	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	32.154	2017	Bandungrejo - Tugu Lor	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.10.1 4.4.00016	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.411.550	Jalan Bandungrejo – Mijen (Ruas 134)
76	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.2	2017	Bandungrejo - Kedung Waru Lor	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.10.1 2.4.00012 ,11.09.10.1 2.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.115.000	Jalan Bandungrejo - Kedungwaru Lor (Ruas 135)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
77	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.406	2017	Bandungrejo - Kedungwaru Kidul	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.10.1 2.4.00025 ,11.09.10.1 2.4.00029	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.521.800	Jalan Kedungwaru Kidul - Kedungwaru Lor (Ruas 141)
78	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	20	2017	Bandungrejo - Kalitekuk Ngaluran	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.10.0 1.4.00020 ,11.09.10.0 1.4.00024	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.500.000	Jalan Bandungrejo - Kalitekuk Ngaluran (Ruas 136)
79	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	29.4	2017	Bermi - Kotaan	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.10.1 7.4.00047 ,11.09.10.1 7.4.00057	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.205.000	Jalan Bandungrejo – Mijen (Ruas 134)
80	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.56	2017	Cangkring B – Cangkring Rembang	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.10.0 3.4.00044 ,11.09.10.0 4.4.00056	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.168.000	Jalan Cangkring B – Mlekang (Ruas 240)
81	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.808	2017	Karanganyar - Gajah	Hak Pakai	20/10/2020	11.09.10.1 3.4.00012 ,11.09.10.0 4.4.00045	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.787.440	Jalan Karanganyar – Gajah (Ruas 137)
82	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.308	2017	Norowito - Undaan Lor	Hak Pakai	11/02/2020	11.09.10.0 9.4.00006 ,11.09.10.0 9.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.030.800	Jalan Norowito - Undaan Lor (Ruas 138)
83	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.805	2017	Wonoketingal - Bandungrejo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.10.0 2.4.00072 ,11.09.10.0 2.4.00074	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.431.750	Jalan Wonoketingal – Bandungrejo (Ruas 139)
84	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.2	2017	Kedungwaru Kidul -Wonorejo	Hak Pakai	30/11/2020	11.09.10.1 1.4.00105 ,11.09.10.1 3.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	6.480.000	Jalan Kedungwaru Kidul – Wonorejo (Ruas 140)
85	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.744	2017	Kedungwaru Kidul -Kedungwaru Lor	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.10.1 2.4.00011 ,11.09.10.1 1.4.00104	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.679.600	Jalan Kedungwaru Kidul - Kedungwaru Lor (Ruas 141)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
86	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.04	2017	Wonoketingal - Cangkring Rembang	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.10.0 3.4.00031 ,11.09.10.0 3.4.00030	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.368.000	Jalan Desa Cangkring Rembang (Ruas 143)
87	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.585	2017	Wonoketingal - Kalitekuk	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.10.0 2.4.00083 ,11.09.10.0 2.4.00087	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.396.250	Jalan Desa Ngaluran (Ruas 144)
88	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	31.024	2017	Wonoketingal - Kramat	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.09.0 2.4.00010 ,11.09.08.2 9.4.00111	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	7.756.000	Jalan Surodadi – Kramat (Ruas 142)
89	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.46	2017	Brambang - Bumirejo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.03.1 0.4.00025 ,11.09.03.1 0.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.961.000	Jalan Brambang – Bumirejo (Ruas 143)
90	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.5	2017	Sidorejo - Brambang	Hak Pakai	13/10/2020	11.09.03.0 8.4.00027 ,11.09.03.0 8.4.00031	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.025.000	Jalan Sidorejo – Brambang (Ruas 144)
91	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.85	2017	Brambang - Sidorejo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.03.1 0.4.00022 ,11.09.03.1 0.4.00021	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.047.500	Jalan Sidorejo – Brambang (Ruas 144)
92	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15.3	2017	Karangawen - Teluk	Hak Pakai	09/04/2020	11.09.03.0 6.4.00025 ,11.09.03.0 6.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.355.000	Jalan Karangawen – Teluk (Ruas 145)
93	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.28	2017	Wonosekar - Sumberejo	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.02.0 2.4.00075	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	10.476.000	Jalan Margohayu – Banyumeneng (Ruas 146)
94	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.72	2017	Wonosekar - Jragung	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.03.0 2.4.00018 ,11.09.03.0 2.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.024.000	Jalan Wonosekar – Jragung (Ruas 147)
95	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.08	2017	Margohayu - Sumberejo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.03.0 1.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.186.000	Jalan Desa Margohayu (Ruas 151)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
96	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.648	2017	Temuroso - Pidodo	Hak Pakai	25/06/2020	11.09.06.0 2.4.00017 ,11.09.06.0 2.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	798.600	Jalan Temuroso – Pidodo (Ruas 148)
97	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.63	2017	Pidodo - Bakalrejo	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.04.2 0.4.00005 ,11.09.04.2 0.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	272.250	Jalan Pidodo – Bakalrejo (Ruas 149)
98	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.39	2017	Pidodo - Klitih	Hak Pakai	25/06/2020	11.09.06.0 2.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 4)	Pembelian	563.400	Jalan Gaji – Donorejo (Ruas 054)
99	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.58	2017	Pidodo - Sampang	Hak Pakai	22/06/2020	11.09.06.0 3.4.00041 ,11.09.04.1 3.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	943.500	Jalan Desa Klitih (Ruas 154)
100	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.695	2017	Pidodo - Grogol	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.06.0 2.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 5)	Pembelian	869.500	Jalan Gaji – Donorejo (Ruas 054)
101	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.25	2017	Klitih - Dukun	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.06.0 2.4.00026 ,11.09.06.0 2.4.00025	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.887.500	Jalan Klitih – Dukun (Ruas 150)
102	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.917	2017	Klitih - Kedunguter	Hak Pakai	02/12/2021	11.09.06.0 2.4.00035 , 00034	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	294.999	Jalan Klitih – Kedunguter (Ruas 151)
103	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.308	2017	Sampang - Klitih	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.06.0 1.4.00063	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	198.480	Jalan Gaji – Donorejo (Ruas 054)
104	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.706	2017	Kedunguter - Karangtowo	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.06.0 9.4.00022 ,11.09.06.0 9.4.00013	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.297.083	Jalan Kedunguter – Dukun (Ruas 154)
105	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.617	2017	Dukun - Klitih	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.06.0 9.4.00028 ,11.09.06.0 9.4.00024	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.315.863	Jalan Klitih – Dukun (Ruas 150)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
106	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.075	2017	Wonokerto - Batu	Hak Pakai	16/12/2020	11.09.06.1 2.4.00085 ,11.09.06.1 2.4.00084	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.476.320	Jalan Wonokerto – Batu (Ruas 152)
107	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.387	2017	Kedunguter - Batu	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.06.1 1.4.00016 ,11.09.06.1 1.4.00015	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.185.293	Jalan Wonokerto – Batu (Ruas 152)
108	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.448	2017	Kedunguter - Dukun	Hak Pakai	29/09/2020	11.09.06.0 9.4.00011 ,11.09.06.1 0.4.00048	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.056.800	Jalan Kedunguter – Dukun (Ruas 154)
109	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.297	2017	Wonowoso - Rejosari	Hak Pakai	29/09/2020	11.09.06.1 5.4.00001 ,11.09.06.1 3.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.153.950	Jalan Wonowoso – Rejosari (Ruas 156)
110	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.052	2017	Wonowoso - Karangsari	Hak Pakai	22/02/2021	11.09.06.1 5.4.00014 ,11.09.06.1 5.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	6.309.240	Jalan Wonoagung – Karangsari (Ruas 157)
111	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.471	2017	Mangunrejo - Werdayo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.15.0 6.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	547.050	Jalan Mangunrejo – Werdayo (Ruas 158)
112	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.578	2017	Mangunrejo - Jl Provinsi	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.15.0 7.4.00016 ,11.09.15.0 7.4.00021	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.736.700	Jalan Mangunrejo - Jl. Provinsi (Ruas 159)
113	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.471	2017	Werdayo - Mangunrejo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.15.0 6.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	547.050	Jalan Mangunrejo – Werdayo (Ruas 158)
114	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.125	2017	Mijen - Kebonagung	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.15.0 5.4.00007 , 00008, 00009	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	412.500	Jalan Megonten – Mijen (Ruas 056)
115	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	22.936	2017	Mijen - Mangunlor	Hak Pakai	12/03/2021	11.09.15.0 3.4.00019 , 00018, 00017	Tanah Jalan (Seksi 4)	Pembelian	2.293.600	Jalan Megonten – Mijen (Ruas 056)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
116	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.328	2017	Kebonagung - Babat	Hak Pakai	16/12/2020	11.09.15.0 8.4.00010 ,11.09.15.0 8.4.00013	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.582.000	Jalan Megonten – Mijen (Ruas 056)
117	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15.4	2017	Mangunlor - Tlogoasih	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.15.0 5.4.00003 ,11.09.15.0 5.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.925.000	Jalan Mangunan Lor – Tlogosih (Ruas 160)
118	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.62	2017	Mangunlor - Babat	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.15.0 8.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	327.500	Jalan Megonten – Jerukgulung Ruas 162)
119	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.16	2017	Babat - Tlogoasih	Hak Pakai	21/11/2020	11.09.15.0 8.4.00006 ,11.09.15.1 0.4.00101	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.770.000	Jalan Megonten - Mijen (Ruas 057)
120	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.525	2017	Tlogoasih - Babat	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.15.0 8.4.00016 ,11.09.15.0 8.4.00017	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.190.625	Jalan Babat – Tlogosih (Ruas 161)
121	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.959	2017	Megonten - Jerukgulung	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.08.1 9.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	869.844	Jalan Megonten – Jerukgulung (Ruas 162)
122	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.242	2017	Babat - Sokokidul	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.15.1 4.4.00004 ,11.09.15.0 9.4.00090	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.030.250	Jalan Megonten – Jerukgulung (Ruas 162)
123	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.902	2017	Kebonagung - Prigi	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.15.0 2.4.00032 ,11.09.15.0 2.4.00031	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	1.725.500	Jalan Solowire – Kebonagung (Ruas 163)
124	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.408	2017	Sarimulyo - Kebonagung	Hak Pakai	02/12/2021	11.09.15.1 2.4.00028 , 00027, 00029	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	940.800	Jalan Sarimulyo – Tlogosih (Ruas 164)
125	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.755	2017	Sarimulyo - Prigi	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.15.1 1.4.00002 ,11.09.15.1 1.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.375.500	Jalan Solowire – Kebonagung (Ruas 163)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
126	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	25.75	2017	Sarimulyo - Solowere	Hak Pakai	30/11/2020	11.09.15.1 3.4.00008 ,11.09.15.1 2.4.00024	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.090.000	Jalan Solowire Kebonagung (Ruas 163)
127	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.24	2017	Ngelowetan - Geneng	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.11.0 3.4.00013 ,11.09.11.0 3.4.00015	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	1.648.000	Jalan Jleper – Geneng (Ruas 165)
128	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15.684	2017	Geneng - Ngaluran	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.11.0 3.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.136.800	Jalan Geneng – Ngaluran (Ruas 166)
129	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.508	2017	Ngelowetan - Jatirejo	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.11.0 3.4.00007 ,11.09.11.0 3.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	150.480	Jalan Ngelowetan Jatirejo (Ruas 167)
130	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.472	2017	Bakung - Mlaten	Hak Pakai	02/12/2021	11.09.11.0 5.4.00016 , 00017, 00018	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.368.000	Jalan Bakung – Mlaten (Ruas 168)
131	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.2	2017	Jatirejo - Bakung	Hak Pakai	27/01/2021	11.09.11.0 3.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.050.000	Jalan Bandungrejo Jatirejo (Ruas 128)
132	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9	2017	Mlaten - Bakung	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.11.0 2.4.00001 ,11.09.11.0 2.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.250.000	Jalan Bakung – Mlaten (Ruas 168)
133	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.4	2017	Mlaten - Tanggul	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.11.0 2.4.00013 ,11.09.07.1 8.4.00016	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	855.000	Jalan Jleper – Geneng (Ruas 165)
134	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8	2017	Mlaten - Geneng	Hak Pakai	27/01/2021	11.09.11.0 3.4.00017 ,11.09.11.0 3.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.400.000	Jalan Mlaten Turirejo (Ruas 169)
135	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4	2017	Bentengmati - Turirejo	Hak Pakai	23/12/2020	00016, 00015, 00017	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	300.000	Jalan Mlaten Turirejo (Ruas 169)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
136	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10	2017	Tanggul - Jleper	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.11.1 0.4.00010 ,11.09.11.1 0.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.000.000	Jalan Jleper – Geneng (Ruas 165)
137	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.6	2017	Pasir - Turirejo	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.11.1 3.4.00032 ,11.09.11.1 3.4.00033	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.860.000	Jalan Pasir – Bango (Ruas 170)
138	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.2	2017	Pasir - Kenduren	Hak Pakai	27/01/2021	11.09.11.1 3.4.00026 ,11.09.11.1 3.4.00027	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	810.000	Jalan Pasir Buko (Ruas 193)
139	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	20.832	2017	Jleper - Rejosari	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.11.1 5.4.00002 ,11.09.11.1 1.4.00012	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.083.200	Jalan Jleper – Rejosari (Ruas 171)
140	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	22.368	2017	Rejosari - Jungsemi	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.11.1 4.4.00010 ,11.09.11.1 4.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.236.800	Jalan Jleper – Rejosari (Ruas 171)
141	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.5	2017	Ngelokulon - Bantengmati	Hak Pakai	27/01/2021	00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	675.000	Jalan Ngelokulon - Bantengmati (Ruas 172)
142	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.4	2017	Mijen - Cangkring Pos	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.11.0 9.4.00011 ,11.09.11.0 9.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.340.000	Jalan Pecuk – Mijen (Ruas 173)
143	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.2	2017	Kalitengah - Kangkung	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.0 5.4.00020 ,11.09.02.0 5.4.00020	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.840.000	Jalan Kalitengah – Kangkung (Ruas 174)
144	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.15	2017	Sumberejo - Kebonbatur	Hak Pakai	16/09/2020	11.09.02.0 3.4.00036 ,11.09.02.0 2.4.00056	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.030.000	Jalan Sumberejo – Kebonbatur (Ruas 175)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
145	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.35	2017	Kebonbatur - Batarsari	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.02.0 4.400102, 11.09.02.0 4.4.00094	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	17.045.000	Jalan Kebonbatur – Batarsari (Ruas 181)
146	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28	2017	Batarsari - Pucanggading	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.02.0 4.4.00089	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	25.200.000	Jalan Kebonbatur – Batarsari (Ruas 176)
147	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.2	2017	Kembangarum - Tamansari	Hak Pakai	28/09/2020	00034, 00035, 00036	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.520.000	Jalan Tegalarum – Kembangarum (Ruas 177)
148	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.4	2017	Tegalarum - Kembangarum	Hak Pakai	19/10/2020	11.09.02.1 8.4.00007 ,11.09.02.1 3.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.040.000	Jalan Tegalarum – Kembangarum (Ruas 177)
149	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.235	2017	Tamansari - Ngemplak	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.02.1 1.4.00009 ,11.09.02.1 1.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.694.000	Jalan Tamansari – Ngemplak (Ruas 178)
150	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.25	2017	Tamansari - Karangsono	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.02.1 3.4.00008 ,11.09.02.1 2.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.125.000	Jalan Tamansari – Karangsono (Ruas 179)
151	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.72	2017	Menur - Brumbung	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.1 0.4.00015 ,11.09.02.1 0.4.00012	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	8.616.000	Jalan Smu Mranggen (Ruas 032)
152	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.823	2017	Wringinjajar - Brumbung	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.1 4.4.00019 ,11.09.02.1 0.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	7.146.900	Jalan Wringinjajar – Menur (Ruas 180)
153	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.35	2017	Wringinjajar - Waru	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.1 6.4.00008 ,11.09.02.1 6.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.670.000	Jalan Wringinjajar – Waru (Ruas 181)
154	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.86	2017	Wringinjajar - Dombo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.05.0 2.4.00034 ,11.09.05.0 3.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.386.000	Jalan Wringinjajar – Waru (Ruas 181)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
155	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.16	2017	Menur - Jetaksari	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.1 4.4.00018 ,11.09.02.1 6.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.074.000	Jalan Wringinjajar – Menur (Ruas 180)
156	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.16	2017	Timbulsloko - Tugu	Hak Pakai	12/01/2020	11.09.05.1 6.4.00010 ,11.09.05.1 6.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	1.032.000	Jalan Gemulak – Timbulsloko (Ruas182)
157	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.575	2017	Tugu - Timbulsloko	Hak Pakai	01/12/2020	11.09.05.1 7.4.00005 ,11.09.05.1 7.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.515.000	Jalan Gemulak – Timbulsloko (Ruas 182)
158	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.3	2017	Banjarsari - Tugu	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.05.1 7.4.00013 ,11.09.05.1 7.4.00012	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	3.860.000	Jalan Banjarsari – Tugu (Ruas 183)
159	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.784	2017	Banjarsari - Sidorejo	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.05.1 9.4.00011 ,11.09.05.1 9.4.00013	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.756.800	Jalan Banjarsari – Tugu (Ruas 183)
160	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15.92	2017	Sidorejo - Gemulak	Hak Pakai	16/12/2020	11.09.05.1 8.4.00010 ,11.09.05.1 8.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	4.776.000	Jalan Wonokerto – Sidorejo (Ruas 155)
161	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.692	2017	Sidorejo - Wonowoso	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.1 8.4.00025 ,11.09.05.1 8.4.00026	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	5.107.176	Jalan Wonokerto – Sidorejo (Ruas 155)
162	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.921	2017	Gemulak - Sidorejo	Hak Pakai	16/12/2020	11.09.05.1 1.4.00031, 11.09.05.1 8.4.00015	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.730.188	Jalan Desa Sidorejo (Ruas 189)
163	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.935	2017	Gemulak - Timbulsloko	Hak Pakai	02/12/2020	11.09.05.1 1.4.00017 ,11.09.05.1 1.4.00025	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.589.600	Jalan Gemulak – Sidorejo (Ruas 184)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
164	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.77	2017	Gemulak - Bogorame	Hak Pakai	12/02/2020	11.09.05.1 1.4.00012 ,11.09.05.1 6.4.00017	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.765.500	Jalan Gemulak – Timbulsloko (Ruas 182)
165	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.458	2017	Pondok Raden Patah -Bedono	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.05.1 3.4.00044 ,11.09.05.1 3.4.00043	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.045.800	Jalan Sriwulan – Bedono (Ruas 185)
166	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	21.900	2017	Gemulak - Bedono	Hak Pakai	12/02/2020	11.09.05.1 2.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.190.000	Jalan Gemulak - Bedono (Ruas 186)
167	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.724	2017	Purwosari - Sayung	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.05.1 4.4.00027	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	931.000	Jalan Purwosari - Prampelan (Ruas 187)
168	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.295	2017	Sayung - Sidogemah	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.05.0 7.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.823.750	Jalan Sayung - Sidogemah (Ruas 188)
169	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.065	2017	Sayung - Jetaksari	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.05.0 6.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.209.750	Jalan Kalisari - Wringinajar (Ruas 189)
170	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.580	2017	Kalisari - Wringinajar	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.0 6.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.916.000	Jalan Kalisari - Wringinajar (Ruas 189)
171	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.670	2017	Prampelan - Sayung	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.0 7.4.00015	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.660.700	Jalan Purwosari - Prampelan (Ruas 193)
172	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.720	2017	Tambakroto - Prampelan	Hak Pakai	18/02/2021	11.09.05.0 4.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.088.000	Jalan Desa Tambakroto (Ruas 196)
173	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.555	2017	Prampelan - Bulusari	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.1 0.4.00026	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.622.000	Jalan Prampelan - Bulusari (Ruas 190)
174	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.200	2017	Waru - Karangasem	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.0 2.4.00049	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.980.000	Jalan Karangasem - Dombo (Ruas 191)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
175	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.570	2017	Karangasem - Dombo	Hak Pakai	22/02/2021	11.09.05.0 5.4.00027	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.135.500	Jalan Karangasem - Dombo (Ruas 191)
176	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.994	2017	Bulusari - Tegalarum	Hak Pakai	22/12/2020	11.09.05.0 3.4.00020	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.198.760	Jalan Bulusari - Tegalarum (Ruas 192)
177	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.115	2017	Timbul Sloko - Dempet	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.05.1 6.4.00027	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	493.800	Jalan Desa Tugu (Ruas 200)
178	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.425	2017	Buko - Kenduren	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.14.0 5.4.00026	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	2.525.250	Jalan Pasir - Buko (Ruas 193)
179	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.652	2017	Kenduren - Buko	Hak Pakai	01/12/2021	Hak Pakai No.00114,	Tanah Jalan (Seksi 4)	Pembelian	1.124.760	Jalan Pasir - Buko (Ruas 193)
180	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.123	2017	Tempel - Kenduren	Hak Pakai	12/01/2021	11.09.14.1 0.4.00051	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.334.760	Jalan Tempel - Kenduren (Ruas 194)
181	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.700	2017	Jungpasir - Mutih Wetan	Hak Pakai	12/01/2021	11.09.14.1 3.4.00035	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.164.000	Jalan Jungpasir Mutih Wetan (Ruas 195)
182	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.740	2017	Tedunan - Mutih Kulon	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.14.1 6.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.217.500	Jalan Tedunan - Mutih Kulon (Ruas 196)
183	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.332	2017	Tedunan - Kendalasem	Hak Pakai	18/02/2021	11.09.14.1 6.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	541.500	Jalan Tedunan - Mutih Kulon (Ruas 196)
184	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.296	2017	Mutih Kulon - Kendalasem	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.14.1 7.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.235.520	Jalan Desa Tedunan (Ruas 205)
185	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.795	2017	Karangrejo - Wonosalam	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.07.2 1.4.00084	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	607.200	Jalan Karangrejo - Wonosalam 1 (Ruas 197)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
186	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.250	2017	Wonosalam - Karangrejo	Hak Pakai	21/10/2020	11.09.07.2 0.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.320.000	Jalan Karangrejo - Wonosalam 2 (Ruas 198)
187	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.815	2017	Jogoloyo - Katonsari	Hak Pakai	21/09/2021	Hak Pakai No.00061	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.498.550	Jalan Jogoloyo - Katonsari (Ruas 199)
188	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.750	2017	Tlogorejo - Wonosalam	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.07.1 8.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	920.000	Jalan Tlogorejo - Kendaldoyong (Ruas 200)
189	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.700	2017	Tlogorejo -	Hak Pakai	04/09/2020	11.09.07.0 7.4.00012	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.455.000	Jalan Tlogorejo - Kendaldoyong (Ruas 200)
190	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.650	2017	Pilangrejo - Karangrowo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.07.0 7.4.00021	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.071.000	Jalan Pilangrejo - Tlogorejo (Ruas 201)
191	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.150	2017	Pilangrejo - Tlogorejo	Hak Pakai	23/07/2020	11.09.07.0 7.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	861.000	Jalan Pilangrejo - Tlogorejo (Ruas 201)
192	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.430	2017	Karangrowo - Tlogorejo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.07.0 5.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	642.350	Jalan Sore - Karangrowo (Ruas 209)
193	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.900	2017	Karangrowo - Kalianyar	Hak Pakai	16/12/2020	11.09.07.0 5.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.870.500	Jalan Karangrowo - Kalianyar (Ruas 202)
194	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.800	2017	Pilangrejo - Karangkulon	Hak Pakai	03/12/2020	11.09.07.0 8.4.00072	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.920.000	Jalan Pilangrejo - Kerangkulon (Ruas 203)
195	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.065	2017	Pilangrejo - Mojodemak	Hak Pakai	24/09/2020	11.09.07.1 0.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	444.425	Jalan Pilangrejo - Mojodemak (Ruas 204)
196	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.530	2017	Mojodemak - Pilangrejo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.07.0 8.4.00070	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	494.200	Jalan Pilangrejo - Mojodemak (Ruas 204)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
197	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.850	2017	Botorejo - Sidomulyo	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.07.1 6.4.00068	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.041.000	Jalan Botorejo - Sidomulyo (Ruas 205)
198	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.180	2017	Sidomulyo - Botorejo	Hak Pakai	03/12/2020	11.09.07.1 6.4.00058	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.346.800	Jalan Botorejo - Sidomulyo (Ruas 205)
199	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.230	2017	Kuncir - Mrisen	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.07.1 3.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	484.500	Jalan Kuncir - Bango (Ruas 206)
200	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.440	2017	Mrisen - Bolo	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.07.1 1.4.00018	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	666.000	Jalan Mrisen - Bolo (Ruas 207)
201	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.450	2017	Kuncir - Trengguli	Hak Pakai	03/03/2021	11.09.07.1 1.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.985.500	Jalan Kuncir – Trengguli (Ruas 208)
202	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.980	2017	Trengguli - Kuncir	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.07.1 1.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.086.200	Jalan Kuncir – Trengguli (Ruas 208)
203	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.198	2017	Sore - Karangrowo	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.07.0 5.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.547.720	Jalan Sorekarangrowo (Ruas 209)
204	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.320	2017	Wonosalam - Ploso	Hak Pakai	02/12/2020	11.09.06.0 6.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.444.800	Jalan Turitempel – Wonosalam (Ruas 221)
205	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.280	2017	Kendaldoyong - Tembiring	Hak Pakai	23/07/2020	11.09.07.1 8.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.964.800	Jalan Kendaldoyong – Tembiring (Ruas 210)
206	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.235	2017	Bango - Kedondong	Hak Pakai	23/06/2020	11.09.12.0 9.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.308.750	Jalan Bango – Mulyorejo (Ruas 211)
207	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.820	2017	Raji - Turirejo	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.12.1 4.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.667.600	Jalan Mulyorejo Turirejo (Ruas 212)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
208	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.150	2017	Bango - Mrisen	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.12.0 9.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	2.104.500	Jalan Kunciir – Bango (Ruas 206)
209	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.388	2017	Donorojo - Mangunjiwan	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.12.0 2.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	862.080	Jalan Donorojo – Mangunjiwan (Ruas 213)
210	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.440	2017	Mulyorejo - Raji	Hak Pakai	22/06/2020	11.09.12.1 4.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.499.200	Jalan Mulyorejo – Turirejo (Ruas 212)
211	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.160	2017	Mulyorejo - Bantengmati	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.12.1 2.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	632.000	Jalan Mulyorejo – Bantengmati (Ruas 214)
212	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.620	2017	Raji - Mulyorejo	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.12.1 4.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	1.371.600	Jalan Bango – Mulyorejo (Ruas 211)
213	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.150	2017	Mrisen - Bango	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.12.0 9.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.104.500	Jalan Kunciir – Bango (Ruas 206)
214	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.520	2017	Turirejo - Bantengmati	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.12.1 5.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	1.808.800	Jalan Mlaten - Turirejo (Ruas 169)
215	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.800	2017	Turirejo - Pasir	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.12.1 5.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	864.000	Jalan Pasir - Bango (Ruas 170)
216	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.820	2017	Turirejo - Raji	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.12.1 5.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	2.667.600	Jalan Pasir - Bango (Ruas 170)
217	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	25.860	2017	Tempuran - Mranak	Hak Pakai	23/11/2021	11.09.12.1 6.4.00059	Tanah Jalan (Seksi 4)	Pembelian	3.103.200	Jalan Pasir - Bango (Ruas 170)
218	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.920	2017	Mangunjiwan - Poncoharjo	Hak Pakai	12/03/2020	11.09.12.0 4.4.00203	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	688.800	Jalan Karangmlati Weding (Ruas 095)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
219	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	10.860	2017	Poncoharjo - Karangmlati	Hak Pakai	05/06/2020	11.09.12.1 9.4.00008	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.520.400	Jalan Poncoharjo Karangmlati (Ruas 215)
220	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.150	2017	Karangmlati - Donorojo	Hak Pakai	05/06/2020	11.09.13.1 9.4.00008	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	922.500	Jalan Donorojo - Mangunjiwan (Ruas 213)
221	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.324	2017	Donorojo - Kalikondang	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.12.0 1.4.00116	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.025.360	Jalan Donorojo - Kalikondang (Ruas 216)
222	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.100	2017	Kalikondang - Jogoloyo	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.12.0 3.4.00048	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.215.000	Jalan Katonsari - Kalikondang (Ruas 217)
223	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.412	2017	Kalikondang - Karangrejo	Hak Pakai	22/06/2020	11.09.12.0 1.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	757.680	Jalan Kalikondang Sumberejo (Ruas 218)
224	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.210	2017	Kedondong - Raji	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.12.1 1.4.00015	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	993.600	Jalan Kedondong - Raji (Ruas 219)
225	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.235	2017	Bango - Kedondong	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.12.1 3.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.477.600	Jalan Bango - Mulyorejo (Ruas 211)
226	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.110	2017	Grogol - Ploso	Hak Pakai	27/10/2021	11.09.06.0 5.4.00039	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.555.400	Jalan Pulosari - Ploso (Ruas 220)
227	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.640	2017	Turitempel - Ploso	Hak Pakai	22/02/2021	11.09.04.1 8.4.00045	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.769.600	Jalan Turitempel - Wonosalam (Ruas 221)
228	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.710	2017	Tlogorejo - Bumiharjo	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.04.1 5.4.00032	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.079.400	Jalan Bakalrejo - Tlogorejo (Ruas 222)
229	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.760	2017	Bakalrejo - Tlogorejo	Hak Pakai	19/10/2020	11.09.04.1 5.4.00031	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.720.200	Jalan Bakalrejo - Tlogorejo (Ruas 222)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
230	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.885	2017	Bumiharjo - Grogol -	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.04.1 7.4.00052	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.832.750	Jalan Tlogorejo - Sidorejo - Trimulyo (Ruas 223)
231	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	5.379	2017	Bakalrejo - Pidodo	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.06.0 3.4.00042	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	753.060	Jalan Pidodo - Bakalrejo (Ruas 149)
232	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.942	2017	Guntur - Temuroso	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.04.1 3.4.00019	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.041.300	Jalan Guntur - Temuroso (Ruas 224)
233	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.285	2017	Temuroso - Sampang	Hak Pakai	30/11/2020	11.09.04.1 3.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	459.900	Jalan Temuroso - Sampang (Ruas 225)
234	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.970	2017	Bogosari - Temuroso	Hak Pakai	17/06/2020	11.09.04.1 3.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.615.950	Jalan Bogosari - Krandon (Ruas 226)
235	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.945	2017	Bogosari - Krandan	Hak Pakai	07/10/2020	11.09.04.0 4.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.207.575	Jalan Bogosari - Krandon (Ruas 226)
236	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.658	2017	Krandan - Temuroso	Hak Pakai	17/06/2020	11.09.04.1 2.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	493.763	Jalan Bogosari - Krandon (Ruas 226)
237	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.329	2017	Tangkis - Pilangsari	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.05.0 9.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.026.060	Jalan Tangkis - Pilangsari (Ruas 227)
238	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.247	2017	Blerong - Tangkis	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.05.0 9.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	615.851	Jalan Tangkis - Pilangsari (Ruas 227)
239	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.780	2017	Pilangsari - Blerong	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.04.1 0.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.629.200	Jalan Pilangsari - Blerong (Ruas 228)
240	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.690	2017	Blerong - Candisari	Hak Pakai	16/10/2020	11.09.04.1 0.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.840.050	Jalan Blerong - Candisari (Ruas 229)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
241	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	11.120	2017	Sarirejo - Wonorejo	Hak Pakai	05/10/2020	11.09.04.0 1.4.00047	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.668.000	Jalan Bumirejo - Sarirejo (Ruas 230)
242	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.650	2017	Bumirejo - Sarirejo	Hak Pakai	28/09/2020	11.09.04.0 1.4.00039	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.047.500	Jalan Bumirejo - Sarirejo (Ruas 230)
243	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	13.350	2017	Wonorejo - Pundenarum	Hak Pakai	12/10/2020	11.09.04.0 1.4.00048	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.802.250	Jalan Wonorejo - Brambang (Ruas 231)
244	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	38.206	2003	Bungo - Mutihkulon	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.14.1 5.4.00035	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.375.416	Jalan Bungo - Mutihkulon (Ruas 015)
245	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	33.290	2003	Wedung - Bungo	Hak Pakai	04/08/2020	11.09.14.0 5.4.00012	TanahJalan (Seksi 1)	Pembelian	665.800	Jalan Wedung - Bungo (Ruas 016)
246	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	46.880	2003	Bonang - Ngawen	Hak Pakai	24/06/2020	11.09.13.2 0.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.844.160	Jalan Bonang - Ngawen (Ruas 017)
247	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	70.810	2003	Bonang - Morodemak	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.13.1 2.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	3.398.880	Jalan Demak - Purworejo (Ruas 018)
248	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	81.012	2003	Demak - Bonang	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.12.1 8.4.00076	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	12.961.920	Jalan Demak - Purworejo (Ruas 018)
249	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	83.080	2003	Buyaran - Guntur	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.06.0 7.4.00030	TanahJalan (Seksi 1)	Pembelian	10.634.240	Jalan Buyaran - Karangawen (Ruas 005)
250	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	35.300	2003	Guntur - Pamongan	Hak Pakai	06/12/2021	11.09.04.0 4.4.00209	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.259.200	Jalan Buyaran - Karangawen (Ruas 005)
251	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	65.513	2003	Wonokerto -	Hak Pakai	27/08/2020	11.09.05.1 8.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.372.066	Jalan Wonokerto - Tambakbulusan (Ruas 020)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
252	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	20.534	2003	Gaji - Candisari	Hak Pakai	06/12/2021	11.09.04.0 9.4.00045	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	985.632	Jalan Gaji - Candisari (Ruas 021)
253	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	32.558	2003	Candisari -	Hak Pakai	04/09/2020	11.09.03.1 2.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.562.784	Jalan Candisari - Karangsono (Ruas 022)
254	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.220	2003	Karangawen - Bumirejo	Hak Pakai	04/08/2020	11.09.03.1 1.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	344.400	Jalan Karangawen Bumirejo (Ruas 023)
255	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	43.312	2003	Kuripan - Wonosekar	Hak Pakai	04/09/2020	11.09.03.0 5.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.169.424	Jalan Kuripan - Wonosekar (Ruas 024)
256	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	61.944	2003	Kangkung - Tlogorejo	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.03.0 1.4.00003	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.238.870	Jalan Kangkung - Tlogorejo (Ruas 025)
257	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.550	2003	Tanjunganyar - Wilalung	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.09.0 3.4.00112	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	666.900	Jalan Tanjungsanyar - Wilalung (Ruas 026)
258	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	57.944	2003	Trengguli - Demung	Hak Pakai	02/12/2020	11.09.07.1 2.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.708.416	Jalan Trengguli - Demung (Ruas 027)
259	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	39.872	2003	Boyolali - Tambirejo	Hak Pakai	30/11/2020	11.09.09.0 8.4.00017	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.913.856	Jalan Boyolali - Tambirejo (Ruas 028)
260	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	123.440	2003	Cangkring - Karangrejo	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.0 4.4.00008	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	29.995.920	Jalan Cangkring - Karangrejo (Ruas 029)
261	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	42.096	2003	Demak - Wonosalam	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.07.2 0.4.00011	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	8.419.200	Jalan Demak - Wonosalam (Ruas 031)
262	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.179	2003	Karangrejo - Wonosalam	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.07.2 1.4.00084	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.606.912	Jalan Karangrejo Tlogosih (Ruas 030)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
263	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	49.120	2003	Pasir - Mijen	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.11.0 9.4.00134	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.768.320	Jalan Mijen - Menco (Ruas 013)
264	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.297	2003	Jl. Smu Mranggen	Hak Pakai	09/09/2015	11.09.02.1 4.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	878.256	Jalan Smu Mranggen (Ruas 032)
265	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	32.802	2003	Jungsemi - Mutihkulon	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.14.1 5.4.00031	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	885.654	Jalan Jetak - Tedunan (Ruas 014)
266	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	99.370	2003	Tlogoboyo - Kalikondang	Hak Pakai	04/09/2020	11.09.13.0 7.4.00115	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.577.320	Jalan Tlogoboyo - Kalikondang (Ruas 034)
267	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	56.336	2003	Bakung - Wonorejo	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.10.1 4.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.704.128	Jalan Bakung - Wonorejo (Ruas 035)
268	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	67.360	2003	Brambang - Waru	Hak Pakai	12/08/2020	11.09.02.1 8.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.311.040	Jalan Brambang - Waru (Ruas 036)
269	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	94.640	2003	Singorejo - Wedung	Hak Pakai	24/09/2020	11.09.12.1 7.4.00030	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	6.056.960	Jalan Singorejo - Wedung (Ruas 037)
270	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	50.944	2003	Onggorawe - Surodadi	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.05.1 1.4.00039	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.260.416	Jalan Onggorawe - Surodadi (Ruas 038)
271	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	55.770	2003	Onggorawe - Bulusari	Hak Pakai	06/03/2015	11.09.05.0 8.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	4.573.140	Jalan Onggorawe Mranggen (Ruas 002)
272	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	38.168	2003	Demak - Donorojo	Hak Pakai	05/06/2020	11.09.12.0 2.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	9.274.824	Jalan Demak - Donorojo (Ruas 039)
273	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	42.600	2003	Surodadi - Morodemak	Hak Pakai	01/11/2021	11.09.06.1 7.4.00007	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	213.000	Jalan Surodadi - Morodemak (Ruas 040)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
274	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	35.618	2003	Mranggen - Kebonbatur	Hak Pakai	27/08/2020	11.09.02.0 4.4.00083	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.282.248	Jalan Mranggen - Kebonbatur (Ruas 041)
275	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.280	2003	Kalianyar - Doreng	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.07.0 4.4.00009	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	877.440	Jalan Kalianyar - Doreng (Ruas 042)
276	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	35.308	2003	Mutihkulon - Tedunan	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.14.1 3.4.00031	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	1.271.088	Jalan Tedunan - Menco (Ruas 043)
277	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	65.359	2003	Tedunan - Menco	Hak Pakai	25/02/2021	11.09.14.1 9.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.764.693	Jalan Tedunan - Menco (Ruas 043)
278	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.000	2003	Surodadi - Bedono	Hak Pakai	12/10/2021	11.09.05.2 0.4.00005	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	120.000	Jalan Surodadi - Bedono (Ruas 044)
279	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	40.600	2003	Donorojo - Karangmlati	Hak Pakai	05/06/2020	11.09.13.1 9.4.00008	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	974.400	Jalan Donorojo - Karangmlati (Ruas 047)
280	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.272	2003	Angin-Angin - Bongkol	Hak Pakai	04/02/2021	11.09.14.0 5.4.00024	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	153.792	Jalan Angin-Angin Bongkol (Ruas 048)
281	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	7.380	2003	Sriwulan - Sayung	Hak Pakai	10/02/2021	11.09.05.1 3.4.00051	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	760.140	Jalan Sriwulan - Sayung (Ruas 049)
282	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	42.210	2003	Kuncir - Jatisono	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.09.1 8.4.00004	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.026.080	Jalan Kuncir - Jatisono (Ruas 051)
283	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	20.160	2003	Loireng - Pilangsari	Hak Pakai	19/10/2020	11.09.05.0 8.4.00023	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	725.760	Jalan Loireng - Pilangsari (Ruas 052)
284	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	24.892	2003	Wonorejo - Undaan Kidul	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.10.0 4.4.00038	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	672.084	Jalan Wonorejo - Undaan Kidul (Ruas 053)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
285	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	28.050	2003	Gaji - Sampang	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.04.1 1.4.00040	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.009.800	Jalan Gaji - Donorejo (Ruas 054)
286	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	41.925	2003	Donorejo - Sampang	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.06.0 4.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.509.300	Jalan Desa Sampang (Ruas 055)
287	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	25.032	2003	Banyumeneng - Kawengen	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.0 1.4.00112	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	500.245	Jalan Banyumeneng - Kawengen (Ruas 055)
288	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	47.241	2003	Megonten - Mijen	Hak Pakai	10/07/2020	11.09.15.0 8.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.267.544	Jalan Megonten - Mijen (Ruas 056)
289	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	67.150	2003	Grogol - Trimulyo	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.06.0 5.4.00036	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.813.050	Jalan Grogol - Trimulyo (Ruas 057)
290	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.084	2003	Jalan Bhayangkara	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00112	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.549.096	Jalan Bhayangkara (Ruas 061)
291	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.436	2003	Jalan Kyai Jebat	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 5.4.00103	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.326.600	Jalan Kyai Jebat (Ruas 062)
292	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.882	2003	Jalan Patimura	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 5.4.00100	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	694.425	Jalan Patimura (Ruas 063)
293	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.486	2003	Jalan Kyai Mugni	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00110	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	359.385	Jalan Kyai Mugni (Ruas 064)
294	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.224	2003	Jalan Kyai Palembang	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.0 5.4.00111	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	410.040	Jalan Kyai Palembang (Ruas 065)
295	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.217	2003	Jalan Noorcahya	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00116	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.250.600	Jalan Noorcahya (Ruas 066)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
296	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	6.400	2003	Jalan Jajar	Hak Pakai	12/03/2021	11.09.12.0 5.4.00356	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	524.800	Jalan Jajar (Ruas 067)
297	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.921	2003	Jalan Semboja	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 5.4.00102	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	875.800	Jalan Semboja (Ruas 068)
298	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	634	2003	Jalan Betengan	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00115	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	812.592	Jalan Betengan (Ruas 069)
299	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	16.001	2003	Jalan Kyai Turmundi	Hak Pakai	12/03/2021	11.09.12.0 5.4.00354	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.360.168	Jalan Kyai Turmudzi (Ruas 070)
300	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.460	2003	Jalan Kyai Sampang	Hak Pakai	12/03/2021	11.09.12.0 5.4.00360	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	824.100	Jalan Kyai Sampang (Ruas 071)
301	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.992	2003	Jalan Kauman Ii	Hak Pakai	19/12/2019	11.09.12.0 5.4.00097	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	891.081	Jalan Kauman II (Ruas 072)
302	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.992	2003	Jalan Kauman Iii	Hak Pakai	08/12/2016	BV 333490	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	484.056	Jalan Kauman III (Ruas 073)
303	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.646	2003	Jalan Domenggalan	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 5.4.00101	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	529.200	Jalan Domenggalan (Ruas 074)
304	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17.730	2003	Jalan Setinggil -	Hak Pakai	01/12/2021	11.09.12.0 5.4.00341	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.053.050	Jalan Setinggil - Mangunjiwan (Ruas 075)
305	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.626	2003	Jalur Lambat Bintoro -	Hak Pakai	12/02/2021	11.09.12.0 1.4.00121	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.433.478	Jalur Lambat Bintoro - Kalikondang (Ruas 076)
306	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.885	2003	Jalan Muka Kabupaten	Hak Pakai		BINTORO HP 114	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.945.320	Jalan Panjang Jimat (Muka Kabupaten) (Ruas 077)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
307	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.080	2003	Kadilangu - Botorejo	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.0 6.4.00010	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.162.240	Jalan Kadilangu - Botorejo (Ruas 078)
308	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	14.745	2003	Jalan Link. Krapyak	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.0 5.4.00364	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.518.735	Jalan Lingkungan Krapyak (Ruas 079)
309	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.394	2003	Jalan Siwalan	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.0 5.4.00121	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.470.608	Jalan Siwalan (Ruas080)
310	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.908	2003	Jalan Betengan/Pasar	Hak Pakai	19/01/2017	11.09.12.0 5.4.00104	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	525.366	Jalan Betengan Pasar (Ruas 081)
311	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.513	2003	Jalan Kenanga	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 3.4.00041	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	2.052.000	Jalan Kenanga (Ruas 082)
312	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3.010	2003	Jalan Glatik	Hak Pakai	19/12/2016	11.09.12.0 5.4.00096	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	645.120	Jalan Gelatik (Ruas 083)
313	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.184	2003	Jalan Angsa	Hak Pakai	04/01/2019	11.09.12.1 8.4.00035	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.047.552	Jalan Angsa (Ruas 084)
314	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.938	2003	Tanah Untuk Jalur Lambat	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.03.1 9.4.00068	Tanah Jalan	Pembelian	581.438	Tanah Untuk Jalur Lambat
315	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.107	2003	Tanah Untuk Jalur Lambat (Tahap Iii)	Hak Pengel olaan	03/12/2021	11.09.07.1 4.4.00029	Tanah Jalan	Pembelian	557.647	Tanah Untuk Jalur Lambat (Tahap Iii)
316	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.260	2003	Tanah Jalur Lingkar (Tahap Iv	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.07.1 4.4.00030	Tanah Jalan	Pembelian	605.295	Tanah Jalur Lingkar (Tahap IV)
317	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	76.999	2003	Mranggen - Banyumeneng	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.02.0 8.4.00020	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.078.960	Jalan Mranggen - Banyumeneng (Ruas 001)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
318	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	62.024	2003	Mranggen - Bulusari	Hak Pakai	06/03/2015	11.09.02.1 1.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	3.969.504	Jalan Onggorawe Mranggen (Ruas 002)
319	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	42.000	2003	Bulusari - Kalisari	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.05.0 3.4.00029	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	2.688.000	Jalan Bulusari - Kalisari (Ruas 003)
320	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	79.300	2003	Pamongan - Bulusari	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.04.0 8.4.00001	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.075.200	Jalan Pamongan - Bulusari (Ruas 004)
321	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	45.195	2003	Karangawen - Pamongan	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.03.1 0.4.00037	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	2.892.480	Jalan Buyaran - Karangawen (Ruas 005)
322	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	81.645	2003	Karangawen - Jragung	Hak Pakai	25/08/2020	11.09.03.0 4.4.00014	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	5.225.280	Jalan Karangawen Jragung (Ruas 006)
323	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	57.530	2003	Dempet - Mintreng	Hak Pakai	21/09/2021	11.09.15.1 0.4.00102	TanahJalan (Seksi 1)	Pembelian	3.681.920	Jalan Dempet - Mintreng (Ruas 007)
324	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	132.940	2003	Gajah - Dempet	Hak Pakai	19/10/2020	11.09.08.2 7.4.00121	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	17.016.320	Jalan Gajah - Dempet (Ruas 009)
325	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	15.200	2003	Gajah - Geneng	Hak Pakai	23/07/2020	11.09.10.0 1.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	972.800	Jalan Gajah - Geneng (Ruas 010)
326	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	47.405	2003	Gedangalas -	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.09.0 6.4.00002	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.801.390	Jalan Gedangalas Tanjunganyar (Ruas 011)
327	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	29.008	2003	Jetak - Jungsemi	Hak Pakai	28/08/2020	11.09.14.1 2.4.00061	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	783.216	Jalan Jetak - Tedunan (Ruas 014)
328	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	12.922	2017	Kedunguter - Sampang	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.06.0 1.4.00059	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	969.150	Jalan Sampang - Kedunguter (Ruas 153)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
329	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	25.620	2017	Wonokerto - Wonowoso	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.06.1 2.4.00071	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	3.330.600	Jalan Wonokerto - Sidorejo (Ruas 155)
330	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	8.520	2017	Sumberejo - Banyumeneng	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.02.0 1.4.00113	Tanah Jalan (Seksi 3)	Pembelian	852.000	Jalan Margohayu - Banyumeneng (Ruas146)
331	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	19.800	2017	Sumberejo - Wonosekar	Hak Pakai	19/10/2020	11.09.02.0 2.4.00061	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	5.940.000	Jalan Margohayu - Banyumeneng (Ruas 146)
332	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	105.570	2003	Bengkal - Karanganyar	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.11.0 8.4.00049	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	6.756.480	Jalan Mijen - Karanganyar (Ruas 019)
333	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	95.949	2003	Wonosalam - Tlogosih	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.07.2 0.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	6.140.736	Jalan Karangrejo - Tlogosih (Ruas 030)
334	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	58.336	2003	Luwuk - Merak	Hak Pakai	23/12/2020	11.09.08.2 2.4.00082	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	3.733.504	Jalan Karanganyar - Merak (Ruas 033)
335	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	23.400	2003	Tambirejo - Medini	Hak Pakai	27/10/2020	11.09.09.1 0.4.00020	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.123.200	Jalan Tambirejo - Medini (Ruas 046)
336	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	18.096	2003	Wonokerto - Karangsari	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.06.0 8.4.00047	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.158.144	Jalan Wonokerto - Karangsari (Ruas 050)
337	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	42.000	2003	Bengkal - Pasir	Hak Pakai	23/10/2020	11.09.11.1 3.4.00006	Tanah Jalan (Seksi 1)	Pembelian	1.134.000	Jalan Mijen - Bungo (Ruas 012)
338	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	9.940	2003	Pasir - Jetak	Hak Pakai	02/11/2020	11.09.11.1 3.4.00013	Tanah Jalan (Seksi 2)	Pembelian	357.840	Jalan Mijen - Menco (Ruas 013)
339	Tanah Untuk Jembatan	2.549	2003	Pengadaan Tanah Jembatan	Hak Pakai	12/10/2021	11.09.15.1 3.4.00043	Tanah Jembatan	Pembelian	89.215	Pengadaan Tanah Jembatan Trimulyo Kalituntang (Lanjutan)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
				Trimulyo Kalituntang							
340	Tanah Untuk Jembatan	2.564	2019	Trimulyo Kec. Guntur	Hak Pakai	11/12/2020	11.09.07.0 1.4.00069	Tanah Jembatan	Pembelian	959.498	Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Trimulyo Kecamatan Guntur
341	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	118.159	2016	D.I Pelayaran Buyaran	Hak Pakai	02/12/2021	11.09.06.1 3.4.00013	Daerah Irigasi	Hibah	20.300.105	D.I Pelayaran Buyaran
342	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	32.062	2016	D.I Polder Batu	Hak Pakai	03/12/2021	11.09.06.1 1.4.00017	Daerah Irigasi	Hibah	2.629.046	D.I Polder Batu
343	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	9.540	2016	D.I Gablok	Hak Pakai	02/12/2021	11.09.03.0 4.4.00016	Daerah Irigasi	Hibah	257.570	D.I Gablok
344	Tanah Kampung	261	2018	Bintoro Demak	Hak Pakai	16/12/1989	11.09.12.0 5.4.00047	Tanah Bangunan	Pembelian	209.322	Koreksi 2018 (Tanah Sebelah Slb Bintoro Demak)

Sumber: Data Aset DINPUTARU, 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	183	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	138.600,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	157.5	Jl. Demak - Kudus	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	332.718,60
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	334	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	382.484,15
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	14.4	Jl. Semarang - Purwodadi Km.23	-	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	49.625,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	348.75	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.975,00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	55	Gajah-Dempet	-	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	921.705,00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	3086.85	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	16.566.988,70
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	120	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.600,00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.300,00
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	148.700,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	60	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	48.700,00
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	45	Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	994.242,00
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4955	Jl. Morosari Sayung	-	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	3.089.110,00
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	428	Jl. Lingkar Demak	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	199.040,00
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	90	Gedung Kantor Uptd Pjj Wilayah 1 Jl. Sultan Hadiwijaya No.4, Bogorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511	-	Tanah Milik Pemda	Hibah	340.382,00
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	72	Pembangunan Gedung Mts Nurul Hidayah Desa Margoayu Kec. Karangawen Pembnagunan Gedung Serba Guna Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar Kab. Demak	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	99.564,00
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	720	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar Kab. Demak	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	197.694,10
18	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	50	Jl. Kyai Jebat No. 35	-	Tanah Milik Pemda	Hibah	105.177,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)
19	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	290.5	Jl.Sultan Trenggono	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	12.957.462,00
20	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	Rusak Berat	432	Halaman Belakang Tembiring Demak	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	5.589.209,90
21	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	210	Sayung	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	492.030,94
22	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	1.5	Pembangunan Gapuro	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	198.536,65
23	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	41.2	Pembangunan Pagar Dan Urugan Halaman Polsek Kota Demak	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	149.082,60
24	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	19	Pembangunan Pagar Mapolsek Mranggen	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	149.133,10
25	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	1	Pembuatan Gapuro Berahan Wetan (Ketapang)	-	Tanah hak lainnya	Pembelian	98.946,32
26	Pagar Lain-lain (dst)	Baik	675	Jalan Demak - Kudus	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	162.566,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang terhadap urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengacu pada Indikator Kinerja sebagai parameter kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah. Indikator-indikator ini ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diselaraskan dengan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Tahun Berjalan.

Analisis Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi cerminan tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Evaluasi atas capaian indikator ini dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar untuk:

1. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Mengidentifikasi hambatan serta peluang peningkatan kinerja;
3. Menyusun langkah – langkah perbaikan untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya;
4. Menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Dengan adanya analisis kinerja pelayanan berbasis IKU dan IKK, maka pelaksanaan program maupun kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terus diarahkan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian visi misi

pembangunan daerah di sektor bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Analisis kinerja pelayanan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dasar hukum yang digunakan dalam analisis ini mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan publik di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah (SPAL), pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, dan penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, untuk urusan pemeritahan bidang pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pelayanan di bidang Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee serta Penatagunaan Tanah. Masing-masing pelayanan tersebut memiliki indikator capaian kinerja yang disesuaikan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kementerian teknis terkait.

Penentuan indikator dilakukan melalui kajian internal, mempertimbangkan data historis, tren kebutuhan masyarakat, kondisi geografis wilayah, serta kapasitas kelembagaan yang tersedia. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara objektif.

Hasil analisis ini disajikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk tabel dan uraian naratif yang menunjukkan pencapaian masing-masing indikator kinerja. Analisis tidak hanya mencatat capaian yang berhasil, tetapi juga mengevaluasi pelayanan yang belum memenuhi target, serta mengidentifikasi penyebabnya. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel teknis, hambatan pengadaan barang dan jasa, hingga kondisi cuaca dan geografis, seringkali menjadi penghambat dalam pencapaian target pelayanan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan disusun untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di tahun mendatang.

Lebih lanjut, evaluasi kinerja pelayanan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi perencanaan program dan kegiatan di tahun 2025 s/d 2029. Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan urusan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

a. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Periode 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah mengupayakan pencapaian target indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara umum, capaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga besar diantaranya sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

Indikator seperti Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai menunjukkan kinerja yang konsisten dan mencapai target. Hal ini menandakan bahwa kinerja internal, sistem pelaporan, dan mekanisme perencanaan hingga pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan dengan baik.

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi jaringan irigasi, air minum dan sanitasi, cakupan aksesibilitas wilayah, kemantapan jalan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , rasion bangunan berizin telah mencapai target yang ditetapkan. Capaiannya juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sebaliknya terdapat capaian yang belum tercapai untuk indikator drainase dan partisipasi tenaga kerja konstruksi.

3. Urusan Pertanahan

Capaian indikator seperti luas alih fungsi lahan, rasio bangunan berizin dan persentase tanah pemkab bersertifikat telah mencapai target yang ditentukan meskipun mengalami penurunan pada rasio capaian untuk indikator persentase tanah pemkab bersertifikat.

Sehubungan dengan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian Kinerja Pelayanan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Urusan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan Wajib	Tersedianya dokumen perencanaan yang sinkron (RPJMD, Renstra, Renja, IKU).	-
2	Nilai SAKIP	Pemerintahan Wajib	Komitmen pimpinan OPD dan SDM perencana yang memahami penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi.	-
3	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pemerintahan Wajib	Tersedianya kanal pengaduan seperti media sosial dinas, call center, dan sistem informasi pengaduan masyarakat.	-
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tercapainya target mayoritas indikator kinerja sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
5	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan	Pekerjaan Umum dan	Pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik dalam Renstra PD, serta	-

No	Indikator Kinerja	Urusan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	evaluasi PD yang ditindaklanjuti	Penataan Ruang	integrasi rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD, memastikan tindak lanjut yang sistematis	
6	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, seperti SPAM dan jamban komunal yang rutin dilakukan setiap tahun	-
7	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program akses air minum sanitasi seperti pembangunan jamban keluarga atau SPAM berbasis di Kab. Demak meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi.	-
8	Persentase rumah tangga berakses air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program nasional seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) mempercepat pembangunan SPAM dan sambungan rumah tangga	-
9	Persentase rumah tangga bersanitasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti jamban keluarga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal	-
10	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penggunaan material beton pada jalan dan jembatan meningkatkan ketahanan infrastruktur, mendukung target kondisi jalan mantap	-
11	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti pengecoran dan penambalan jalan berlubang yang rutin dilakukan.	-
12	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penerapan material beton untuk betonisasi jalan, seperti pada proyek Jalan Pemuda, meningkatkan ketahanan jalan terhadap kerusakan akibat cuaca atau beban kendaraan	-
13	Rasio jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dukungan program nasional (swasembada pangan) dan provinsi (pengelolaan SDA berkelanjutan) mempercepat pembangunan embung dan jaringan irigasi usaha tani (JITUT)	-

No	Indikator Kinerja	Urusan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
14	Persentase drainase dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Tahun 2023 ada bencana banjir di sebagian besar wilayah di Kabupaten Demak, terutama di Kota Demak
15	Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Kurangnya keterlibatan tenaga konstruksi dalam proyek pembangunan.
16	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dukungan program nasional (swasembada pangan) dan provinsi (pengelolaan SDA berkelanjutan) mempercepat pembangunan embung dan jaringan irigasi usaha tani (JITUT)	-
17	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan saluran drainase rutin dilakukan terutama di saat musim hujan.	-
18	Rasio tenaga kerja konstruksi di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keterlibatan tenaga konstruksi yang bersertifikat dalam proyek pembangunan	-
19	Ketaatan RTRW	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang dan sosialisasi kebijakan penataan ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.	-
20	Luas alih fungsi lahan	Pertanahan	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, pengembangan kawasan industri.	-
21	Rasio bangunan terizin	Pertanahan	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan kegiatan sinkronisasi perencanaan tata ruang.	-
22	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	Pertanahan	Kerja sama erat dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan BPN memastikan proses sertifikasi berjalan lancar	-

Sumber: Analisis DINPUTARU Kab. Demak, 2025

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka			92,03	92,06	92,09	92,12	92,15	92,04	92,08	92,09	92	-	100,01	100,02	100,00	99,97	-
2	Nilai SAKIP	Angka			78,97	79,22	79,47	79,72	79,97	75,61	76,4	76,4	-	-	95,75	96,44	96,14	-	-
3	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%			100	100	100	100	100	87,5	87,5	87,5	-	-	87,50	87,50	87,50	-	-
5	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi PD yang ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
6	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%			91,10	92,12	93,15	94,17	95,07	92,79	93,82	96,405	96,4	-	101,86	101,85	103,49	102,37	-
7	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%			91,10	92,11	93,13	94,15	95,04	92,79	93,82	96,13	96,1	-	101,86	101,86	103,22	102,07	-
8	Persentase rumah tangga berakses air minum	%			83,34	84,13	85,03	86,18	87,59	85,58	87,64	100	92,2	-	102,69	104,17	117,61	106,99	-
9	Persentase rumah tangga bersanitasi				99,03	99,23	99,42	99,74	100	100	100	100	100	-	100,98	100,78	100,58	100,26	-
10	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%			74,45	76,21	77,97	79,74	81,53	101,99	88	100,23	-	-	136,99	115,47	128,55	-	-
11	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka			0,60	1,67	1,68	1,68	1,69	0,64	0,67	1,68	1,68	-	106,67	40,12	100,00	100,00	-
12	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%			83,93	84,45	84,98	85,54	86,24	88,06	89,365	85,407	82,463	-	104,92	105,82	100,50	96,40	-
13	Rasio jaringan irigasi	Angka			11,23	11,96	12,70	13,44	14,18	11,24	11,96	13,07	13,07	-	100,09	100,00	102,91	97,25	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Persentase drainase dalam kondisi baik	%			86,31	89,12	91,92	94,72	97,52	89,03	90,12	90,12	92,14	-	4,30	101,12	98,04	97,28	-
15	Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	%			24,67	25,70	26,74	27,77	28,80	26,79	25,7	26,24	-	-	108,59	100,00	98,13	-	-
16	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%			69,94	75,99	82,03	88,07	94,11	64,17	78,38	85,67	85,67	-	91,75	103,15	104,44	97,27	-
17	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
18	Rasio tenaga kerja konstruksi di wilayah kabuapten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	Angka			47,68	50,27	52,85	55,43	58,00	47,68	52,27	52,99	52,99	-	100,00	103,98	100,26	95,60	-
19	Ketaatan RTRW	%			62,1	62,25	62,4	62,55	62,7	62,08	62,25	62,41	62,48	-	101,13	100,00	100,02	99,89	-
20	Luas alih fungsi lahan				0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
21	Rasio bangunan terizin	Angka			0,00844	0,00875	0,00907	0,00938	0,00969	0,0219	0,02	0,0219	-	-	259,48	228,57	241,46	-	-
22	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%			82,23	86,67	91,12	95,56	100	92,13	94,74	96	30	-	112,04	109,31	105,36	31,39	-

Sumber: Laporan Bahan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025

*Catatan: Realisasi Tahun Tahun 2025 mengacu pada Triwulan I

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang dijabarkan dalam 11 indikator kinerja utama. Cakupan sasaran dari beberapa indikator yaitu cakupan aksesibilitas antar wilayah pada tahun 2022 sebesar 101,99%. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai 88%. Hal ini karena realisasi rasio kemantapan jalan kabupaten, rasio jaringan irigasi, persentase drainase dalam kondisi baik dan ketaatan terhadap RTRW juga mengalami penurunan. Cakupan aksesibilitas antar wilayah ini mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan nilai 100%. Hal ini didukung oleh komponen aksesibilitas antar wilayah yang bisa memenuhi target bahkan melebihi target yang ditentukan pada tahun 2024.

Pada tahun 2025 Triwulan I, rasio pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak menunjukkan tren yang positif karena sebagian besar indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak bisa mencapai nilai diatas 100%.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Tingkat capaian anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi beberapa urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan urusan pertanahan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.195.334	27.206.926	28.670.237	33.981.565	44.657.078	22.004.673	21.747.177	19.396.356	5.629.419	0	84,00	79,93	67,65	16,57	0,00	0,15	-0,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.785	150.000	150.000	225.000	200.000	99.488	111.648	154.816	9.195	0	76,07	74,43	103,21	4,09	0,00	0,13	-0,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.390	37.500	37.500	75.000	75.000	54.410	29.702	37.110	0	0	98,23	79,21	98,96	0,00	0,00	0,17	-0,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	47.948	24.758	7.415	0	0	79,91	41,26	12,36	0,00	0,00	-0,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	8.397	14.925	0	0	0	55,98	99,50	0,00	0,00	0,00	-0,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.395	37.500	37.500	75.000	50.000	45.078	25.601	78.023	1.780	0	59,79	68,27	208,06	2,37	0,00	0,04	0,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.065.070	18.535.914	19.263.526	20.875.540	21.316.700	17.129.390	15.963.770	16.394.631	5.249.053	0	89,85	86,12	85,11	25,14	0,00	0,03	-0,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.824.716	16.043.550	16.444.639	16.875.540	17.316.700	15.360.794	14.220.777	14.665.328	4.652.823	0	91,30	88,64	89,18	27,57	0,00	0,01	-0,24
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.240.354	2.492.364	2.818.887	4.000.000	4.000.000	1.768.596	1.742.993	1.729.303	596.230	0	78,94	69,93	61,35	14,91	0,00	0,17	-0,23
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	710.000	75.000	125.000	125.000	25.000	0	24.169	34.819	450	0	0,00	32,23	27,86	0,36	0,00	0,40	-0,18
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	35.000	125.000	125.000	25.000	0	15.318	34.819	450	0	0	43,77	27,86	0,36	0,00	2,30	0,14
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	40.000	0	0	0	0	8.851	0	0	0	0	22,13	0	0,00	0	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	710.000	710.000	703.500	823.850	846.235	525.640	581.029	514.532	0	0	74,03	81,84	73,14	0,00	0,00	0,06	-0,34

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185.000	185.000	203.500	223.850	246.235	47.125	75.000	42.500	0	0	25,47	40,54	20,88	0,00	0,00	0,08	-0,28
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	525.000	525.000	500.000	600.000	600.000	478.515	506.029	472.032	0	0	91,15	96,39	94,41	0,00	0,00	0,04	-0,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.500	1.763.650	1.958.615	2.292.797	2.671.990	519.503	807.329	481.482	58.651	0	49,88	45,78	24,58	2,56	0,00	0,28	-0,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000	50.000	60.000	85.000	120.000	20.422	14.201	19.351	4.516	0	40,84	28,40	32,25	5,31	0,00	0,26	-0,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000	150.000	200.000	230.000	439.230	87.590	69.324	43.399	8.260	0	58,39	46,22	21,70	3,59	0,00	0,35	-0,46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000	122.296	82.711	62.707	4.512	0	61,15	41,36	31,35	1,96	0,00	0,00	-0,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000	165.000	181.500	199.650	219.615	71.632	66.791	33.288	15.129	0	47,75	40,48	18,34	7,58	0,00	0,10	-0,37
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000	16.500	18.150	19.965	21.962	9.840	10.480	9.980	3.800	0	65,60	63,52	54,99	19,03	0,00	0,10	-0,20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.500	996.150	1.105.765	1.326.342	1.458.976	147.176	380.507	228.980	17.934	0	49,64	38,20	20,71	1,35	0,00	0,69	0,09
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000	36.000	43.200	51.840	62.208	1.000	34.215	26.778	4.500	0	3,33	95,04	61,99	8,68	0,00	0,20	10,72
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	59.549	149.100	57.000	0	0	39,70	99,40	38,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.120.000	1.832.000	1.955.200	3.700.000	13.700.000	1.192.168	2.083.980	343.850	0	0	106,44	113,75	17,59	0,00	0,00	1,07	-0,36
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	600.000	600.000	2.000.000	3.500.000	0	0	77.600	0	0	0	0,00	12,93	0,00	0,00	1,03	0,00
Pengadaan Alat Besar	0	0	0	0	5.000.000	0	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	100.000	110.000	121.000	200.000	200.000	79.800	22.900	4.200	0	0	79,80	20,82	3,47	0,00	0,00	0,21	-0,84

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.020.000	1.122.000	134.200	500.000	3.000.000	1.112.368	301.080	262.050	0	0	109,06	26,83	195,27	0,00	0,00	1,74	-0,62
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	800.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	300.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.000	725.000	736.000	1.120.000	1.115.000	476.952	461.250	413.324	125.442	0	67,85	63,62	56,16	11,20	0,00	0,14	-0,28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	1.350	4.800	4.800	0	0	9,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,02	0,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.000	600.000	600.000	900.000	900.000	441.432	416.915	395.521	120.072	0	75,07	69,49	65,92	13,34	0,00	0,13	-0,27
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000	110.000	121.000	200.000	200.000	34.170	39.535	13.003	5.370	0	34,17	35,94	10,75	2,69	0,00	0,21	-0,37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.714.979	3.415.362	3.778.396	4.819.378	4.782.153	2.061.532	1.714.003	1.058.902	186.629	0	75,93	50,19	28,03	3,87	0,00	0,16	-0,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000	44.000	48.400	53.240	119.103	10.029	23.521	18.600	0	0	25,07	53,46	38,43	0,00	0,00	0,38	0,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	950.979	1.000.000	1.100.000	1.500.000	1.331.000	625.543	458.545	276.211	67.254	0	65,78	45,85	25,11	4,48	0,00	0,10	-0,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100.000	110.000	121.000	133.100	146.410	65.647	97.602	49.420	49.135	0	65,65	88,73	40,84	36,92	0,00	0,10	0,00
Pemeliharaan Mebel	54.000	80.000	60.500	100.000	100.000	16.095	53.520	9.976	0	0	29,81	66,90	16,49	0,00	0,00	0,22	0,17
Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	1.225.000	121.760	200.000	200.000	200.000	0	66.653	53.372	5.368	0	0,00	54,74	26,69	2,68	0,00	-0,06	-0,55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.000	1.741.362	1.764.496	2.300.000	2.300.000	1.039.399	818.369	434.663	0	0	301,28	47,00	24,63	0,00	0,00	1,09	-0,56

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	120.000	484.000	533.038	585.640	304.820	0	19.500	0	0	0	0,00	4,03	0,00	0,00	1,08	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	198.240	0	0	0	0	195.792	197.160	64.872	0	0	98,77	0	0,00	0	0,00	-0,33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.525.402	12.800.000	14.500.000	18.500.000	22.500.000	26.313.630	19.465.658	9.675.802	3.400	0	103,09	152,08	66,73	0,02	0,00	0,03	-0,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.525.402	12.800.000	14.500.000	18.500.000	22.500.000	26.313.630	19.465.658	9.675.802	3.400	0	103,09	152,08	66,73	0,02	0,00	0,03	-0,59
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	328.552	99.533	0	0	0	65,71	19,91	0,00	0,00	0,00	-0,85
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	560.000	0	0	0	0	291.511	0	0	0	0	52,06	0	0	0,00	0	0,00 %	0,00%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.677.689	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000	5.702.104	4.113.732	781.795	0	0	85,39	68,56	13,03	0,00	0,00	0,06	-0,70
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	18.287.713	6.300.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	20.320.016	15.023.374	8.794.474	3.400	0	111,11	238,47	109,93	0,03	0,00	0,07	-0,56
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.144.290	4.100.000	4.100.000	6.100.000	11.100.000	12.328.261	18.534.485	262.608	38.900	0	81,41	452,06	6,41	0,64	0,00	0,14	-0,44
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.144.290	4.100.000	4.100.000	6.100.000	11.100.000	12.328.261	18.534.485	262.608	38.900	0	81,41	452,06	6,41	0,64	0,00	0,14	-0,44
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000	243.505	210.048	0	0	0	52,94	42,01	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,57
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	13.584.290	3.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	11.170.783	17.822.992	0	38.900	0	82,23	594,10	0,00	0,78	0,00	0,22	-0,20
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	68.350	0	0	0	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	913.973	433.095	262.608	0	0	91,40	86,62	52,52	0,00	0,00	-0,13	-0,64

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	47.125.726	49.715.000	64.100.000	86.700.000	106.009.000	101.816.072	114.131.192	152.752.687	9.660	0	216,05	229,57	238,30	0,01	0,00	0,23	-0,18
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	47.125.726	49.715.000	64.100.000	86.700.000	106.009.000	101.816.072	114.131.192	152.752.687	9.660	0	216,05	229,57	238,30	0,01	0,00	0,23	-0,18
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.209.000	1.066.913	360.479	823.822	0	0	96,99	36,05	74,89	0,00	0,00	0,03	-0,13
Pembangunan Jalan	28.945.926	8.000.000	13.100.000	21.000.000	22.000.000	74.804.268	58.772.617	44.048.101	0	0	258,43	734,66	336,25	0,00	0,00	0,14	-0,49
Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.500.000	1.515.000	1.800.000	8.300.000	7.800.000	871.613	244.795	0	0	0	58,11	16,16	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,72
Rekonstruksi jalan	8.987.135	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	8.805.791	34.242.027	106.603.749	0	0	97,98	285,35	888,36	0,00	0,00	0,15	1,33
Rehabilitasi Jalan	3.042.665	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.129.413	3.076.433	0	9.660	0	102,85	61,53	0,00	0,19	0,00	0,16	-0,02
Pembangunan Jembatan	3.550.000	5.000.000	13.000.000	13.000.000	29.700.000	12.341.415	13.634.643	0	0	0	347,65	272,69	0,00	0,00	0,00	0,82	0,10
Penggantian Jembatan	0	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	3.030.987	1.277.014	0	0	0	20,21	8,51	0,00	0,00	0,08	-0,19
Rehabilitasi Jembatan	0	2.100.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	796.658	769.211	0	0	0	0	36,63	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,03
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0	100.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.800.000	11.414.500	12.653.500	32.853.500	48.510.000	15.577.094	9.482.548	21.906.434	160.824	0	74,89	83,07	173,13	0,49	0,00	0,43	-0,02
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.950.000	6.074.500	6.510.000	24.710.000	34.560.000	14.128.515	9.287.645	18.171.035	61.399	0	109,10	152,90	279,12	0,25	0,00	0,68	-0,13
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	197.419	196.322	0	0	0	98,71	98,16	0,00	0,00	0,00	-0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembanguna n Embung dan Penampung Air Lainnya	0	0	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,50	0,00
Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	0	400.000	200.000	3.500.000	2.500.000	0	398.282	98.036	0	0	0	99,57	49,02	0,00	0,00	3,93	-0,75
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	500.000	500.000	500.000	6.000.000	4.000.000	747.510	494.900	1.359.346	0	0	149,50	98,98	271,87	0,00	0,00	3,56	0,14
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	0	600.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.905.710	0	0	0	0	650,95	0,00	0,00	2,00	0,00
Rehabilitasi Tanggul Sungai	200.000	400.000	400.000	1.000.000	2.000.000	187.633	3.042.322	357.934	24.245	0	93,82	760,58	89,48	2,42	0,00	0,88	4,47
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.600.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	99.509	494.965	1.033.345	0	0	6,22	98,99	206,67	0,00	0,00	0,08	1,35
Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	0	600.000	660.000	660.000	660.000	0	597.152	548.677	0	0	0	99,53	83,13	0,00	0,00	0,03	-0,08
Normalisasi/Restorasi Sungai	10.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	10.000.000	12.597.443	3.563.196	10.206.643	0	0	123,50	197,96	567,04	0,00	0,00	0,93	0,05
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	150.000	600.000	600.000	600.000	600.000	132.923	0	98.093	0	0	88,62	0,00	16,35	0,00	0,00	0,75	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	0	24.500	50.000	150.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	0	750.000	700.000	500.000	800.000	0	158.647	99.425	0	0	0	21,15	14,20	0,00	0,00	0,08	-0,37
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	74.323	127.654	267.506	400	0	74,32	85,10	178,34	0,27	0,00	0,13	0,27
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	289.174	213.108	0	36.754	0	144,59	142,07	0,00	24,50	0,00	-0,06	-0,26
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000	5.340.000	6.143.500	8.143.500	13.950.000	1.448.580	194.903	3.735.399	99.425	0	18,45	3,65	60,80	1,22	0,00	0,22	5,44

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	98.041	347.590	0	0	0	28,01	99,31	0,00	0,00	0,00	2,55
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	3.000.000	4.000.000	8.000.000	373.495	0	98.697	0	0	0	0	3,29	0,00	0,00	0,67	0,00
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	1.500.000	1.000.000	0	0	0	1.075.085	0	0	0	0	71,67	0,00	0	0,00	0	-0,33	0,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	0	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	98.721	0	0	0	0,00	19,74	0,00	0,00	0,17	0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	2.092.794	0	0	0,00	0,00	209,28	0,00	0,00	0,04	0,00
Rehabilitasi Bendung Irigasi	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	0	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	98.547	0	0	0	0,00	19,71	0,00	0,00	0,17	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	350.000	190.000	193.500	193.500	500.000	0	96.863	890.913	0	0	0,00	50,98	460,42	0,00	0,00	0,29	8,20
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	58.425	0	0	0	0,00	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	0	0	49.713	99.425	0	0	0,00	9,94	19,89	0,00	0,33	1,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000	700.000	700.000	5.200.000	1.950.000	897.559	688.832	349.100	45.716	0	299,19	98,40	49,87	0,88	0,00	1,78	-0,53
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000	700.000	700.000	5.200.000	1.950.000	897.559	688.832	349.100	45.716	0	299,19	98,40	49,87	0,88	0,00	1,78	-0,53
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	4.500.000	1.250.000	0	0	349.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-0,72	0,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	227.213	0	0	0	0	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	897.559	461.620	0	45.716	0	299,19	153,87	0,00	15,24	0,00	0,00	-0,49
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	65.424	146.100	161.588	0	0	65,42	14,61	16,16	0,00	0,00	2,25	0,11
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	65.424	146.100	161.588	0	0	65,42	14,61	16,16	0,00	0,00	2,25	0,11
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	65.424	146.100	161.588	0	0	65,42	14,61	16,16	0,00	0,00	2,25	0,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	200.000	2.300.000	12.800.000	2.800.000	2.800.000	739.340	1.417.477	1.176.628	25.810	0	369,67	61,63	9,19	0,92	0,00	3,57	-0,08
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000	1.100.000	11.600.000	1.600.000	1.600.000	739.340	427.701	195.708	8.763	0	369,67	38,88	1,69	0,55	0,00	3,30	-0,64
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	200.000	1.000.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	739.340	333.626	0	0	0	369,67	33,36	0,00	0,00	0,00	3,41	-0,55
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	94.075	195.708	8.763	0	0	94,08	195,71	8,76	0,00	0,00	0,06
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	661.451	671.680	0	0	0	66,15	67,17	0,00	0,00	0,00	0,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	661.451	671.680	0	0	0	66,15	67,17	0,00	0,00	0,00	0,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	328.325	309.240	17.046	0	0	164,16	154,62	8,52	0,00	0,00	-0,33
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	328.325	309.240	17.046	0	0	164,16	154,62	8,52	0,00	0,00	-0,33
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.425.000	32.000.000	40.250.000	60.000.000	47.928.200	0	12.311.400	937.204	400	0	0,00	38,47	2,33	0,00	0,00	0,96	-0,96
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.425.000	32.000.000	40.250.000	60.000.000	47.928.200	0	12.311.400	937.204	400	0	0,00	38,47	2,33	0,00	0,00	0,96	-0,96

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7.425.000	30.000.000	38.000.000	58.000.000	42.000.000	45.232.098	12.111.855	0	0	0	609,19	40,37	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,73
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0	2.000.000	2.250.000	2.000.000	5.928.200	0	199.545	937.204	400	0	0	9,98	41,65	0,02	0,00	0,66	1,35
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	560.000	1.000.000	500.000	1.000.000	9.500.000	560.531	283.290	306.440	22.554	0	100,09	28,33	61,29	2,26	0,00	2,45	-0,45
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	560.000	1.000.000	500.000	1.000.000	9.500.000	560.531	283.290	306.440	22.554	0	100,09	28,33	61,29	2,26	0,00	2,45	-0,45
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	560.000	1.000.000	500.000	1.000.000	9.500.000	560.531	283.290	306.440	22.554	0	100,09	28,33	61,29	2,26	0,00	2,45	-0,45

Sumber: Laporan Bahan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025
* Catatan: Realisasi Tahun Tahun 2025 mengacu pada Triwulan I

Dari tabel di atas, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 20,77% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 3,64%. Pertumbuhan anggaran tahunan rata-rata 20,77% menunjukkan peningkatan alokasi anggaran, tetapi realisasi hanya tumbuh 3,65%, mengindikasikan tantangan dalam penyerapan anggaran. Pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun dikarenakan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan adanya tambahan belanja pegawai. Selama tahun 2022-2025, anggaran terbesar yaitu pada tahun 2025 dan anggaran terkecil yaitu tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan banyak program untuk menunjang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Demak. Sebagian besar anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialokasikan untuk infrastruktur sumber daya air dan penataan ruang, yang krusial bagi Kabupaten Demak mengingat tantangan banjir yang sering terjadi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, antara lain :

1. Perencanaan yang baik;
2. Pelaksanaan yang baik;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan secara berkala;
4. Komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak maka kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum Kabupaten Demak

Masyarakat umum adalah penerima manfaat utama dari layanan infrastruktur dasar yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang, seperti jalan, jembatan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan tata ruang.

Sub-kelompok dan Layanan:

- a) Penduduk: Warga Demak, khususnya rumah tangga, yang memerlukan akses air minum layak (capaian 92,26% pada 2024) dan sanitasi (100% pada 2024) melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan fasilitas seperti jamban keluarga atau IPAL komunal. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertugas memastikan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur ini untuk meningkatkan kualitas hidup.
- b) Pengguna Jalan: Masyarakat, termasuk pelaku usaha logistik, yang memanfaatkan jaringan jalan kabupaten (target kemantapan jalan 89,829% atau 791,27 km pada 2025) untuk mobilitas sehari-hari. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertanggung jawab atas pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
- c) Pemilik Bangunan: Individu atau kelompok yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk memastikan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memfasilitasi perizinan dan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.

2. Petani dan Kelompok Tani

Petani dan kelompok tani merupakan kelompok sasaran utama untuk layanan irigasi dan pengelolaan lahan pertanian, mengingat 58,85% wilayah Demak adalah lahan sawah produktif.

Sub-kelompok dan Layanan:

- a) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A: Kelompok tani yang mengelola jaringan irigasi usaha tani (JITUT) dan embung untuk mendukung pertanian. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan rasio jaringan irigasi 13,44 pada 2025, dengan pembangunan 2 km jaringan permukaan dan 1 km jaringan tambak.
- b) Petani di Kawasan Budidaya: Petani di daerah irigasi (DI) seperti DI Suka Baru di Kecamatan Bonang yang mendapatkan manfaat dari pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

untuk meningkatkan produktivitas padi. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang juga berupaya mencegah alih fungsi lahan sawah.

3. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program infrastruktur dan mitigasi bencana, serta pengelolaan aset tanah Pemkab.

Sub-kelompok dan Layanan:

- a) Pemerintah Desa: Desa-desa, terutama 89 desa terdampak banjir rob pada 2024, dilayani melalui program mitigasi bencana (penanaman mangrove, pemecah ombak bambu) dan sertifikasi tanah kas desa, seperti di Sidogemah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mendukung pembangunan infrastruktur desa seperti jalan usaha tani (JUT).
- b) Lembaga Kemasyarakatan: Kelompok seperti Desa Tangguh Bencana (Destana, 37 desa) terlibat dalam pengelolaan ruang dan mitigasi bencana untuk mendukung ketahanan wilayah sesuai RTRW.

4. Pelaku Usaha dan Investor

Pelaku usaha dan investor memerlukan layanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk perizinan tata ruang dan akses infrastruktur guna mendukung kegiatan ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata.

Sub-kelompok dan Layanan:

- a) Pengembang dan Kontraktor: Pengembang perumahan, kawasan industri, atau proyek strategis (misalnya, jalan tol Semarang-Demak) yang membutuhkan izin tata ruang dan PBG untuk memastikan kepatuhan terhadap RTRW.
 - b) UMKM dan Klaster Ekonomi: Usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama di kawasan wisata atau koridor ekonomi Kedungsepur, yang memanfaatkan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi untuk akses pasar.
- ### 5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lain dan Instansi Eksternal
- OPD lain dan instansi eksternal menjadi mitra dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan program infrastruktur serta tata ruang untuk memastikan sinergi lintas sektor.

Sub-kelompok dan Layanan:

- a) OPD Terkait: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) berkolaborasi dalam penyusunan RTRW, sertifikasi aset tanah Pemkab (target 315 sertifikat pada 2022, 194 selesai), dan pembangunan infrastruktur.
- b) Instansi Pusat/Provinsi: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Dinas PU Provinsi Jawa Tengah mendukung pengelolaan irigasi, jalan, dan mitigasi bencana, seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan dengan Kawasan Kedungsepur; menciptakan integrasi pengembangan kawasan metropolitan Semarang khususnya di Kecamatan Demak, Mranggen, dan Sayung;
2. Pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa secara produktif;
3. Memanfaatkan potensi jalan tol sebagai pintu gerbang dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Pengaturan dan pengendalian kegiatan di kawasan pesisir untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah, rob, dan abrasi;

5. Pengembangan dan peningkatan lahan budidaya melalui peningkatan jaringan irigasi tambak dan irigasi pertanian;
6. Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan permukiman untuk meningkatkan akses layanan yang memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesehatan;
7. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan ruang untuk pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan pengembangan permukiman;
8. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Dinamika perkembangan dan perubahan regulasi terkait penataan ruang dan pertanahan berpengaruh terhadap penyusunan prioritas dan inovasi dalam implementasinya.
10. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi;

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja perangkat daerah. Peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

1. Pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui pengembangan, penyehatan lingkungan permukiman berupa pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan air limbah;
2. Dukungan mobilitas yang menunjang sektor pariwisata, sektor produksi, sektor perdagangan dan jasa menjadi lebih mantap.
3. Pengembangan proyek strategis nasional di kawasan pesisir Demak untuk mengurangi dampak abrasi, banjir dan rob;
4. Percepatan implementasi program pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir, pertanian dan pusat produksi;
5. Dukungan regulasi yang memberikan kemudahan bagi stakeholder dan pengguna layanan untuk mendapatkan informasi terkait penataan ruang dan pertanahan.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 79 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rumusan Permasalahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan publik terkait pekerjaan umum seperti air minum bersih, sanitasi, hingga drainase	- Keterbatasan anggaran dan pendanaan - Keterbatasan Infrastruktur dan pemeliharaan - Kualitas dan ketersediaan sumber air baku
2	Belum optimalnya kualitas pemerataan infrastruktur jalan	- Perencanaan dan prioritas yang kurang optimal - Kondisi geografis dan bencana alam - Kerusakan jalan dan pemeliharaan yang tidak memadai
3	Kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan irigasi	- Degradasi sumber daya air - Kerusakan infrastruktur irigasi - Pola pengelolaan air yang tidak efisien
4	Semakin tingginya permasalahan banjir rob	- Penurunan muka tanah (<i>land subsidence</i>) - Kenaikan muka air laut - Infrastruktur drainase yang tidak memadai
5	Tingginya potensi limpahan air dan longsoran tanggul, khususnya pada musim hujan	- Kerusakan dan kelemahan struktur tanggul - Keterbatasan pemeliharaan infrastruktur - Aktivitas masyarakat dan tata guna lahan
6	Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW	- Tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi - Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		- Kurangnya sinkronisasi dan sosialisasi RTRW
7	Geoportal Demak masih dalam tahap rintisan dengan keterbatasan data spasial tematik	- Kurangnya investasi infrastruktur digital dan anggaran terbatas untuk pengembangan platform, - Ketergantungan pada data eksternal dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tanpa integrasi penuh

Sumber: Analisis DINPUTARU Kab. Demak, 2025

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu

“Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”

Namun demikian, tantangan masih ada terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang berkelanjutan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri. Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Berdasarkan hal tersebut, dalam RPJMN tertuang Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan cita – cita Indonesia yang tertuang dalam Visi Presiden dan Wakil Presiden. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut meliputi :

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan uraian Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat keselarasan antara Misi Presiden dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029 ada pada **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Sasaran utama yang relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah; pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan daerah dan pengembangan jembatan dan jalan tol strategis.
2. Penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur dasar; Air minum dan sanitasi yang layak, pengelolaan drainase dan air limbah.

- 3. Penguatan infrastruktur pengendali banjir dan sumber daya air; pembangunan dan revitalisasi bendungan, embung, irigasi, dan pengaman pantai.
- 4. Pengembangan kawasan strategis; kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pertanian dan kawasan pariwisata prioritas serta dukungan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan highlight intervensi oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang akan memberikan dukungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9.
Dukungan Program Kabupaten Demak terhadap RPJMN 2025-2029

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nonenklatur	Lokus
1	Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	Program Penyelenggaraan Jalan	Kec. Sayung, Kec. Karangtengah
2	Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban	Program Penyelenggaraan Jalan	Kec. Wonosalam, Kec. Demak, Kec. Gajah
3	Pembangunan tanggul pantai/laut Kendal Semarang Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kec. Bonang, Kec. Sayung, Kec. Guntur, Kec. Karangtengah, Kec. Kebonagung
4	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat antara lain D.I Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kec. Karangawen
5	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada area tangkapan air (catchment area) di wilayah DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kec. Karangawen

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nonenklatur	Lokus
6	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kec. Karangawen
7	Pembangunan Bendungan Dolog	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kec. Mranggen

Sumber: RPJMN 2025-2029

b. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Renstra Kementerian PUPR memberikan kerangka strategis yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, terutama dalam pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan air minum, sanitasi dan drainase. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah untuk mendukung program nasional, seperti penanganan banjir, irigasi, dan pembangunan tol. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia perlu diatasi melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian PUPR, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat. Dengan implementasi yang terkoordinasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat mendukung pencapaian target Renstra PUPR sekaligus mengatasi permasalahan lokal seperti banjir rob, limpahan air, dan alih fungsi lahan.

c. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2024–2026 memiliki keselarasan yang kuat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, terutama dalam penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat kabupaten untuk mendukung program

provinsi, seperti perbaikan jalan, irigasi, dan penanganan banjir. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi, dan kapasitas SDM perlu diatasi melalui kolaborasi erat dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat. Dengan implementasi yang terkoordinasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat mendukung pencapaian Renstra sekaligus mengatasi permasalahan lokal seperti banjir rob, limpahan air, dan alih fungsi lahan.

d. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dinas PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2024-2026, sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2021-2026, difokuskan pada visi "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Dokumen ini, yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUSDATARU, menekankan tiga prioritas utama: pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, pengembangan infrastruktur pekerjaan umum yang resilien terhadap bencana, dan penataan ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Sasaran strategis mencakup peningkatan rasio akses air bersih hingga 95% pada 2026, rehabilitasi 80% infrastruktur irigasi dan drainase provinsi, serta pencapaian indeks kualitas tata ruang sebesar 85% melalui evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, dengan indikator kinerja utama (IKU) seperti persentase pengendalian banjir di wilayah rawan dan luas lahan terlindungi tata ruang. Program unggulan meliputi pembangunan bendungan dan waduk provinsi, seperti pengembangan sumber air baku di DAS (Daerah Aliran Sungai) utama, serta koordinasi dengan kementerian pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek strategis nasional, termasuk mitigasi rob (banjir pasang) di pesisir utara Jawa Tengah.

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031, sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 untuk Kabupaten Demak dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak 2011 – 2031

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
1	Perwujudan Pusat Kegiatan			
	Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal			
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen	APBD	Dinputaru Kab. Demak
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinputaru Kab. Demak
2	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instasi Pelaksana
	Sistem Jaringan Transportasi Jalan			
	Program pengembangan sistem prasarana jalan			
	Peningkatan jalan kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak
	Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak
3	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air			
a	Normalisasi sungai dan saluran irigasi	Seluruh sungai dan 15 D.I	APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
b	Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi	15 D.I	APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
c	Pembangunan embung	- Kecamatan Karangawen - Kecamatan Guntur - Kecamatan Dempet - Kecamatan Mijen - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung	APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
4	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya			
a	Sistem Jaringan Air Minum			
	Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak PDAM Kab. Demak

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Pengembangan jaringan distribusi utama	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak PDAM Kab. Demak
	Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak PDAM Kab. Demak
b	Sistem Jaringan Air Limbah			
	Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Mijen - Kecamatan Mranggen - Kecamatan Karangawen	APBD	Dinputaru Kab. Demak DLH Kab. Demak
	Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung - Ibukota Kecamatan Wonosalam - Ibukota Kecamatan Gajah - Ibukota Kecamatan Karanganyar - Ibukota Kecamatan Mijen - Ibukota Kecamatan Bonang - Ibukota Kecamatan Sayung - Ibukota Kecamatan Karangtengah - Ibukota Kecamatan Guntur - Ibukota Kecamatan Dempet	APBD	Dinputaru Kab. Demak DLH Kab. Demak

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instasi Pelaksana
		- Ibukota Kecamatan Karangawen - Ibukota Kecamatan Kebonagung		
	Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan	Seluruh Kawasan IKK	APBN APBD Provinsi APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
	Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
c	Sistem Jaringan Drainase			
	Penyusunan masterplan drainase	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak
	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak
	Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinputaru Kab. Demak
	Normalisasi saluran sungai	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
	Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	Dinputaru Kab. Demak
5	Perwujudan Pola Ruang			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Kawasan Bencana Alam			
	Pembangunan tanggul penahan abrasi	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung	APBN APBD Provinsi APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah Dinputaru Kab. Demak
6	Perwujudan Kawasan Strategis			
	Kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung			
	Pendataan lokasi dan luas tanah timbul	Kecamatan Wedung	APBD	Dinputaru Kab. Demak DLH Kab. Demak Dinlutkan Kab. Demak
	Pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat		APBD	Dinputaru Kab. Demak DLH Kab. Demak Dinlutkan Kab. Demak

Sumber : RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah terkait:

Tabel 2.11.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku yang belum tercukupi	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga • Peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukung Instalasi Pengolah Air • Meningkatkan infrastruktur penyediaan air minum

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Demak 2025-2029

Tabel 2.12.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
Pilar Lingkungan 11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	3	3	3	3	3	Meningkat/ada	- Menjamin penyediaan RTH sesuai RTRW dan memperkuat pengawasan alih fungsi lahan - Membangun dan memelihara RTH publik yang fungsional dan estetis untuk mendukung ekologi dan rekreasi - Memastikan keberlanjutan RTH melalui pemeliharaan rutin dan pengelolaan berbasis teknologi

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

g. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak dan Misi 4 Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu PP 3. Demak Produktif dan Mandiri, PP.5 Demak Mantap dan PP.6 Demak Tangguh Lestari. Program Prioritas Demak Mantap berhubungan langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam pembangunan infrastruktur penumpu pangan, rehabilitasi dan penataan jalan kabupaten terintegrasi, dan penataan kawasan perkotaan dan penerangan jalan utama. Pada Program Prioritas Demak Tangguh Lestari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam mitigas dan penanggulangan banjir, rob dan kekeringan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Isu Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya dan ketersediaan sarana prasarana	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur	Pemenuhan infrastruktur yang belum merata	Geopolitik dan geoekonom	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pembangunan				dan ramah lingkungan	dan Berkelanjutan
	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Demak	Belum optimalnya kualitas pelayanan berbasis digital	Pergeseran budaya akibat teknologi informasi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis
	Pemenuhan infrastruktur yang belum merata	Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi	-	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber: Analisis DINPUTARU Kab. Demak dan Dokumen KLHS, 2025

Selain isu di atas, Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak juga memperhatikan Isu Geospasial yang berkembang saat ini. Elemen geospasial seperti data spasial, pemetaan, dan sistem informasi geografis menjadi krusial dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terutama di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, yang melibatkan perencanaan pemanfaatan ruang, pengelolaan data geospasial dasar (IGD), dan integrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Kabupaten Demak, sebagai wilayah pesisir di Jawa Tengah, menghadapi tantangan unik seperti banjir, rob (genangan air pasang), abrasi, land subsidence (penurunan permukaan tanah), dan perubahan garis pantai, yang memerlukan data geospasial akurat untuk mitigasi dan perencanaan. Namun, terdapat beberapa isu geospasial yang belum sepenuhnya teratasi. Isu-isu ini didasarkan pada reviu pelaksanaan geospasial Demak, termasuk pembentukan Tim Jaringan IGD melalui Keputusan Bupati Nomor 555/461 Tahun 2023, dan komitmen pengembangan geoportal. Berikut ini data identifikasi Isu Geo Spasial yang

berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tertuang pada tabel 2.14

Tabel 2.14.
Isu Geospasial berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No.	Identifikasi Isu Geospasial	Keterkaitan Perangkat Daerah	Dampak
1.	Geoportal masih berstatus rintisan dengan keterbatasan data spasial	Pengelolaan dan penyebarluasan data geospasial tematik untuk perencanaan tata ruang, termasuk integrasi dengan JIGN untuk IGD (seperti peta dasar, batas wilayah, dan lahan). Bidang Tata Ruang bertanggung jawab sebagai sekretariat Tim Jaringan IGD.	Menghambat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penerbitan perizinan. Misalnya, data spasial sesuai Kebijakan Umum Geospasial Indonesia (KUGI) belum lengkap, menyebabkan kesulitan dalam pemantauan perubahan garis pantai akibat rob dan abrasi di wilayah pesisir seperti Sayung.
2.	Kurangnya pemutakhiran data spasial real-time untuk mitigasi bencana	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk drainase, sumber daya air, dan infrastruktur jalan yang rentan bencana. Tupoksi melibatkan monitoring spasial untuk evaluasi pembangunan.	Meningkatkan risiko banjir dan land subsidence, seperti yang memengaruhi tata ruang pesisir Demak. Tanpa update data satelit atau SIG, perencanaan drainase dan jalan tol Semarang-Demak menjadi kurang akurat, berpotensi menimbulkan konflik lahan dan kerugian ekonomi.
3.	Tumpang tindih dan ketidakakuratan data spasial antar lembaga	Koordinasi pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang dengan instansi lain (misalnya Bapperida dan Dinas Pertanian), termasuk berbagi data spasial pertanahan untuk RDTR.	Menyebabkan konflik pemanfaatan lahan, terutama di kawasan pertanian dan industri. Di Demak, ini terlihat dalam penyelesaian batas wilayah yang lambat, menghambat program prioritas seperti pemanfaatan ruang berbasis pertanian dan pariwisata sesuai Perda Nomor 1/2020.
4.	Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk analisis spasial	Pembinaan teknis dan pelatihan dalam pengelolaan data geospasial, termasuk penggunaan citra satelit untuk pemetaan infrastruktur (jalan, jembatan, bangunan gedung).	Menghalangi optimalisasi pelayanan, seperti dalam pelatihan peta geospasial untuk pertanian di Kecamatan Mijen. Kurangnya SDM terlatih menyebabkan ketergantungan pada data eksternal, memperlambat respons terhadap isu

			seperti perubahan iklim di wilayah rawan banjir.
5.	Integrasi data spasial dengan kebijakan satu peta nasional yang belum merata	Penyusunan program perencanaan dan pelaporan tata ruang berbasis georeferensi tunggal, sesuai Kebijakan Satu Peta untuk sinkronisasi data.	Menimbulkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Mijen. Di Demak, ini berdampak pada peningkatan biaya operasional dan risiko ketidakpatuhan regulasi, terutama untuk pembangunan berkelanjutan di tengah populasi yang tumbuh.

Sumber: Analisis DINPUTARU Kab. Demak dan Dokumen KLHS, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata;
2. Meningkatnya kualitas layanan jalan;
3. Meningkatnya kualitas layanan Sumber Daya Air (SDA);
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Meningkatnya daya tampung drainase;
5. Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
7. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung;
8. Meningkatnya kualitas pengembangan jasa konstruksi.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kualitas layanan jalan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	angka	4,6	4,6	4,61	4,61	4,62	4,62	4,62		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	angka	76,70	77,00	77,30	77,60	77,90	78,20	78,50		
			Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	%	42,62	42,90	43,16	43,66	44,16	44,66	45,16		
		Meningkatnya kualitas jalan kewenangan kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75		
	Meningkatnya kualitas layanan Sumber Daya Air		Indeks kinerja sumber daya air	%	NA	100	100	100	100	100	100		
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks kinerja sistem irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,27	60,52	61,77	63,02	64,27	65,52	66,77		
			Luas wilayah rawan banjir yang tertangani (Ha)	Ha	119,96	129,02	138,073	147,13	156,18	165,24	174,29		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya daya tampung drainase	persentase drainase dalam kondisi baik	%	92,14	92,20	92,72	93,24	93,76	94,28	94,8		
		Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP)	%	5,79	10	15	20	25	30	32		
			Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum	%	92,26	92,42	92,58	92,73	92,89	93,05	93,20		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Indeks kepuasan layanan tata ruang dan bangunan gedung	%	N/A	92,08	92,09	92,1	92,11	92,12	92,13		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Angka	N/A	0,502	0,62	0,706	0,792	0,91	0,94		
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio bangunan berizin	Angka	0,00969	0,00969	0,0219	0,0233	0,0246	0,0259	0,0272		
		meningkatkan kualitas pengembangan jasa konstruksi	Persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan	%	26,79	27,7	28,8	29,84	30,87	31,9	32,94		

Sumber: Analisis DINPUTARU, 2025

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Perancangan dan evaluasi pengendalian struktur organisasi beserta norma, standar, prosedur pelayanan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan layanan publik	Perancangan dan evaluasi pengendalian struktur organisasi beserta norma, standar, prosedur pelayanan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan layanan publik	Perancangan dan evaluasi pengendalian struktur organisasi beserta norma, standar, prosedur pelayanan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan layanan publik	Perancangan dan evaluasi pengendalian struktur organisasi beserta norma, standar, prosedur pelayanan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan layanan publik	Perancangan dan evaluasi pengendalian struktur organisasi beserta norma, standar, prosedur pelayanan tugas fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan layanan publik
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang sehat melalui penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030	
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik	
Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten	Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten	Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten	Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten	Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten	
Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	
Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat di bidang konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi
Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi	Meningkatkan infrastruktur bangunan SDA melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem jaringan irigasi
Mengurangi luasan wilayah genangan yang ada di kawasan pusat kota demak melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase perkotaan	Mengurangi luasan wilayah genangan yang ada di kawasan pusat kota demak melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase perkotaan	Mengurangi luasan wilayah genangan yang ada di kawasan pusat kota demak melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase perkotaan	Mengurangi luasan wilayah genangan yang ada di kawasan pusat kota demak melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase perkotaan	Mengurangi luasan wilayah genangan yang ada di kawasan pusat kota demak melalui kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase perkotaan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Memaksimalkan SDM dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Memaksimalkan SDM dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Memaksimalkan SDM dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Memaksimalkan SDM dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Memaksimalkan SDM dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Melakukan inventarisasi tanah Pemkab yang pengelolaannya dilakukan OPD lain	Melakukan inventarisasi tanah Pemkab yang pengelolaannya dilakukan OPD lain	Melakukan inventarisasi tanah Pemkab yang pengelolaannya dilakukan OPD lain	Melakukan inventarisasi tanah Pemkab yang pengelolaannya dilakukan OPD lain	Melakukan inventarisasi tanah Pemkab yang pengelolaannya dilakukan OPD lain

Sumber : Analisis DINPUTARU Kab. Demak, 2025

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keter angan
1	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	- Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah - Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah - Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi - Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air - Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang	- Peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan - Peningkatan kualitas sumber daya air - Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	

Sumber: RPJMD dan Analisis DINPUTARU, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan program prioritas Bupati - Wakil Bupati pada program prioritas Demak Mantap serta Demak Tangguh dan Lestari. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Demak Produktif dan Mandiri

Program ini bertujuan menciptakan masyarakat Demak yang lebih produktif secara ekonomi melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan (nelayan), serta pariwisata, sambil mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kegiatan prioritas yang diimplementasikan meliputi bantuan simultan untuk produksi dan

pemasaran bagi petani, nelayan, UMKM, serta Pedagang Kaki Lima (PKL), pengembangan infrastruktur pariwisata, dan peningkatan investasi lokal untuk memperkuat daya saing daerah

2. Program Prioritas Demak Mantap

Terdiri dari kegiatan prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur penumpu pangan yang berupa survei teknis dan perencanaan infrastruktur prioritas, peningkatan jalan kabupaten strategis (*hotmix* atau cor beton), pembangunan atau rehab jembatan dan *box culvert*, pembangunan atau rehabilitasi irigasi dan jaringan air bersih, pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan dan perkotaan. Kegiatan prioritas rehabilitasi dan penataan jalan kabupaten terintegrasi yang berupa rehabilitasi jalan rusak berat dan ringan, pelebaran dan penataan sempadan jalan, pembangunan talud jalan di pinggir sungai, perbaikan jembatan rusak dan sambungan jalan. Kegiatan prioritas rehabilitasi dan pembangunan fasilitas satuan pendidikan yang berupa pembangunan sarana air bersih, sanitasi, dan ramah difabel. Kegiatan prioritas penataan kawasan perkotaan dan penerangan jalan utama yang ber upa penataan ruang kota dan fasilitas umum, penataan drainase perkotaan dan jalan lingkungan. Program Prioritas Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak” yang berupa penataan jalur pedestrian berkarakter, revitalisasi drainase kota dengan estetika terpadu.

3. Program Prioritas Demak Tangguh dan Lestari

Program ini dirancang untuk membangun Demak yang lebih tangguh dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, tangguh menghadapi ancaman bencana alam khususnya banjir rob di wilayah pesisir seperti Kecamatan Sayung, serta lestari melalui upaya pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan prioritas yang diimplementasikan mencakup pembentukan desa tangguh bencana, program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan sosialisasi mitigasi risiko lingkungan.

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Dukungan Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satua n	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiat an
PP. 5	DEMAK MANTAP															
KP 1	Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan	jumlah Panjang saluran irigasi/jaringan air yang direhabilitasi	km		0,66	889.350	2,57	8.800.000	2,65	9.100.000	2,5	8.500.000	2,94	10.000.000		
		jumlah Drainase lingkungan & kawasan rawan genangan yang diperbaiki	lokasi		4	800.000	2	200.000	2	200.000	1	100.000	2	200.000		
		Jumlah JUT/JITUT yang dibangun atau diperkeras	km		33	70.294.614	23	145.000.000	14	104.000.000	10	57.000.000	9	91.000.000		
	AP1. Survei Teknis dan Perencanaan Infrastruktur Prioritas	jumlah lokasi strategis yang tersurvei dan terdokumentasi (DED, survey topografi, rekomendasi teknis)	lokasi		3	400.000	13	2.700.000	13	2.880.000	13	3.060.000	13	3.240.000	1.03.102.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
																Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	AP2. Peningkatan Jalan Kabupaten Strategis (Hotmix/Cor Beton)	peningkatan jalan kabupaten yang diperkeras dan diperlebar (Akses ke kawasan produksi dan pusat pertumbuhan)	km	168,47	10	59.998.087	20	124.000.000	11	68.000.000	7	42.000.000	6	35.000.000	1.03.1 0.2.01. 0032	Pembangunan Jalan
	AP3. Pembangunan/ Rehab Jembatan & Box Culvert	jumlah Jembatan akses sekolah, pasar, dan jalur evakuasi yang ditangani	unit		23	10.296.527	3	21.000.000	3	36.000.000	3	15.000.000	3	56.000.000	1.03.1 0.2.01. 0032 1.03.1 0.2.01. 0031	Pembangunan Jalan Penggantian Jembatan
	AP4. Pembangunan/ Rehabilitasi Irigasi & Jaringan Air Bersih	jumlah Saluran primer-sekunder, embung, irigasi tersier yang	km		0,66	889.350	3,06	10.400.000	3,15	10.700.000	2,97	10.100.000	3,53	12.000.000	1.03.0 2.2.02. 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
		dibangun/diperbaiki														
	AP6. Pembangunan & Perbaikan Drainase Lingkungan & Perkotaan	jumlah Saluran titik rawan banjir (talud dan gorong-gorong) yang teratasi	lokasi		4	800.000	2	200.000	2	200.000	1	100.000	2	200.000	1.03.06.2.01.0029 1.03.06.2.01.0031	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	AP7. Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Lembaga Sumber Daya Air yang Diberdayakan	Lembaga		21	350.000	21	350.000	21	350.000	21	350.000	21	350.000	1.03.02.2.01.0075 1.03.02.2.01.0078	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkat

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
																an Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
KP 2	Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi	Panjang jalan kabupaten yang diperbaiki menyeluruh	km	168,47	1,5	3.758.750	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000		
		Jumlah ruas jalan sempadan sungai yang dibangun talud jalan	km	N/A	0,35	1.450.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000		
		Ruas jalan yang diperlebar ke standar 5-7 meter	km		0,5	700.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
		jumlah jembatan yang di perbaiki	lokasi	27	1	180.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
	AP1. Rehabilitasi Jalan Rusak Berat & Ringan	panjang jalan rusak yang dilakukan Pelapisan ulang, pengaspalan ulang, betonisasi, tambal sulam	km	168,47	1,5	3.758.750	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	1.03.1 0.2.01. 0032 1.03.1 0.2.01. 0044	Pembangunan Jalan Rehabilitasi Jalan
	AP2. Pelebaran dan Penataan Sempadan Jalan	Perluasan badan jalan dan pembebasan kecil	km		0,5	700.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1.03.1 0.2.01. 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	AP3. Pembangunan Talud Jalan di Pinggir Sungai	panjang Talud dengan pasangan batu, bronjong, sabuk jalan pengaman	km		0,35	1.450.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000	1,43	6.000.000	1.03.1 0.2.01. 0032	Pembangunan Jalan
	AP6. Perbaikan Jembatan Rusak & Sambungan Jalan	jumlah jembatan yang di perbaiki (Plat, girder, perkerasan sambungan “mlekeh” diganti mulus)	unit	27	1	180.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1.03.1 0.2.01. 0039 1.03.1 0.2.01. 0040	Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan
KP 7	Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama	Jumlah kawasan perkotaan tertata dan terintegrasi	lokasi				3	3.000.000	3	3.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
		Jumlah jalur pedestrian, drainase dan taman kota tertata	lokasi		4	800.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000		
	AP1. Penataan Ruang Kota dan Fasilitas Umum	jumlah taman, trotoar, halte, lampu taman, kursi publik, drainase yang tertata	lokasi	N/A	-	-	3	3.000.000	3	3.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	AP3. Penataan Drainase Perkotaan dan Jalan Lingkungan	jumlah titik rawan genangan air yang tertata (normalisasi saluran, jalur sampah, trotoar hijau)	titik	N/A	4	800.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	1.03.06.2.01.0031	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
KP 7b	Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak”	jumlah jalur pedestrian bergaya Majapahit-Islamic terbangun	km	N/A	-	-	2,5	10.000.000	1	10.000.000	0,8	10.000.000	1,7	10.000.000		
		jumlah Drainase kota tradisional-modern tertangani dan	lokasi	N/A	-	-	2	3.000.000	3	3.000.000	2	1.000.000	2	3.000.000		

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
		dikendalikan dengan baik														
	AP6. Penataan Jalur Pedestrian Berkarakter	Jumlah panjang jalur pedestrian yang tertata dengan baik (batu bata merah, relief Wali Songo–Majapahit, kanopi islami)	km	N/A			2,5	10.000.000	2,7	20.000.000	0,8	10.000.000	0,9	10.000.000	1.03.1 0.2.01. 0032	Pembang unan Jalan
	AP8. Revitalisasi Drainase Kota dengan Estetika Terpadu	jumlah drainase kota dengan estetika terpadu (Talud + jalur hijau + batu alami sebagai saluran)	lokasi	n/a	3	8.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	2.000.000	2	3.500.000	1.03.0 6.2.01. 0029	Pembang unan Sistem Drainase Perkotaan
PP. 6	DEMAK TANGGUH DAN LESTARI															
KP 4.	Penguatan Sistem Mitigasi & Penanganan Bencana Iklim Ekstrem	jumlah tanggul dan saluran kritis pengendali banjir dan rob yang diperkuat	titik		43	12.745.500	33	12.250.000	20	9.850.000	20	16.400.000	20	29.600.000		

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
		Jumlah embung dalam aktif untuk cegah kekeringan	unit		1	300.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
		Jumlah pompa dalam aktif untuk cegah kekeringan	unit		4	1.800.000	3	4.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
	AP1. Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai & Saluran Air	Jumlah titik rawan banjir yang tertangani (Sungai kecil dan sekunder, talud, tanggul, pintu air)	titik		43	12.745.500	33	12.250.000	20	9.850.000	20	16.400.000	20	29.600.000	1.03.02.2.01.0093 1.03.02.2.01.0126	Normalisasi/Restorasi Sungai Rehabilitasi Tanggul Sungai
	AP2. Peningkatan jalan utama	Panjang jalan yang direhabilitasi	km				3 km	45.000.000								

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Target	Anggaran (dalam ribuan)	Kode	Subkegiatan
	AP3. Penyediaan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	rumah													
	AP4. Pengadaan & Operasi Pompa Banjir dan Sumur Resapan	jumlah Pompa stasioner dan mobile	unit		4	1.800.000	3	4.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1.03.0 2.2.01.0013 1.03.0 2.2.01.0085	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
	AP4. Pengembangan Embung dan Sistem Irigasi Tahan Kekeringan	jumlah Embung desa, long storage, irigasi tetes	unit		1	300.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		Embung

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati - Wakil Bupati, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan urusan wajib atau pilihan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan pertanahan. Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			184.731.930.709		139.016.047.218		139.002.004.891		143.289.822.141		140.579.517.564	
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			184.731.930.709		139.016.047.218		139.002.004.891		143.289.822.141		140.579.517.564	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.407.631.787		23.582.435.218		24.809.012.891		25.746.830.141		26.536.525.564
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dengan Satuan:%)	93	93,02		93,03		93,04		93,05		93,06	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000		402.866.923		408.051.561		400.474.728		408.234.452
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:dokumen)	16	12		12		12		12		12	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150.000.000		152.866.923		158.051.561		150.474.728		158.234.452
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	8		8		8		8		8	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.309.131.787		18.476.068.295		18.644.674.169		18.814.966.101		18.986.960.953
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.693.650.841		16.860.587.349		17.029.193.223		17.199.485.155		17.371.480.007
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	144	179		179		179		179		179	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.615.480.946		1.615.480.946		1.615.480.946		1.615.480.946		1.615.480.946

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan dan data pendapatan daerah sesuai dengan aturan (Dengan Satuan:laporan)	0	0		1		1		1		1	
1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				956.541.076		956.541.076		956.541.076		956.541.076		956.541.076
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				167.500.000		167.500.000		167.500.000		167.500.000		167.500.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				789.041.076		789.041.076		789.041.076		789.041.076		789.041.076
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	200	250		250		250		250		250	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6		6		6		6		6	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	5124	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.181.118.000		1.181.118.000		2.233.905.161		3.009.007.312		3.618.948.159
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	76	47		48		47		47		47	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				262.500.000		262.500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	15	7		7		1		1		1	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar				500.000.000		500.000.000		1.283.905.161		2.059.007.312		2.568.948.159

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3		3		1		1		1	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				20.222.000		20.222.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	20		20		30		30		30	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				398.396.000		398.396.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	15	15		15		15		15		15	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				665.000.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	218	164		164		164		164		164	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	36	76		76		76		76		76	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.210.840.924		1.210.840.924		1.210.840.924		1.210.840.924		1.210.840.924
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				48.972.176		48.972.176		48.972.176		48.972.176		48.972.176
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				514.140.000		514.140.000		514.140.000		514.140.000		514.140.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	47	47		47		47		47		47	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	100	2		2		2		2		2	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	200	210		210		210		210		210	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				244.368.748		244.368.748		244.368.748		244.368.748		244.368.748
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	7		7		7		7		7	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				243.360.000		243.360.000		243.360.000		243.360.000		243.360.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				75.631.306.922		44.400.000.000		41.300.000.000		45.900.000.000		43.050.000.000
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	88,07	89,78		90,98		92,19		93,40		94,61	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	19	34		42		49		55		60	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				74.179.306.922		41.050.000.000		37.950.000.000		42.550.000.000		39.700.000.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Ha)	0	138,07		147,13		156,18		165,23		174,29	
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				3.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	3	2		2		2		2		2	
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	5	3		3		3		3		3	
1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam				500,000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	3		2		2		2		2	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai				1.621.306.922		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:KM)	0	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				250.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Dengan Satuan:Lembaga)	90	1		1		1		1		1	
1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	4		4		4		4		4	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				597.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1		3		3		3		3	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	4		4		4		4		4	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai				15.050.000.000		15.000.000.000		13.000.000.000		15.100.000.000		14.000.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	P a n j a n g S u n g a i y a n g Dinormalisasi/Direstorasi (Dengan Satuan:KM)	1,4	5		5		5		5		5	
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				500,000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	2		2		2		2		2	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				50.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	2	1		1		1		1		1	
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	7	3		2		2		2		2	
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai				51.860.000.000		18.600.000.000		17.500.000.000		20.000.000.000		18.250.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:KM)	0,2	1		1		1		1		1	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.452.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Dengan Satuan:Ha)	1607	1610		1613		1616		1619		1622	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				500,000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	2	1		1		1		1		1	
1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak				500,000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	0	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:KM)	0,6	1		1		1		1		1	
1.03.02.2.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak				500,000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:KM)	1,25	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:KM)	0,387	3		3		3		3		3	
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Bendung)	2	2		2		2		2		2	
1.03.02.2.02.0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:KM)	1	2		2		2		2		2	
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	0	21		21		21		21		21	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa				500,000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersusunnya Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) (Dengan Satuan:%)	74,15	74,18		74,21		74,24		74,27		74,30	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga yang memperoleh layanan air minum (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	3600	100		100		100		100		100	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Dengan Satuan:Liter/Detik)	20	8		8		8		8		8	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter/Detik)	0	2		2		2		2		2	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.900.000.000		1.900.000.000		3.900.000.000		2.650.000.000		1.900.000.000
	Meningkatnya Layanan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak (Dengan Satuan:%)	83,33	84,43		84,50		84,56		84,62		84,68	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.900.000.000		1.900.000.000		3.900.000.000		2.650.000.000		1.900.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	1000	200		200		200		200		200	
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0		2.000.000.000		0		0
	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (Dengan Satuan:M3/Hari)	0	0		0		16		0		0	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				0		0		0		750.000.000		0
	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		0		1		0	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1		1		1		1		1	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Dengan Satuan:Orang)	0	1000		1000		1000		1000		1000	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000
	Tersedianya Unit Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat	0	200		200		200		200		200	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		anaerob (Dengan Satuan:Rumah Tangga)											
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				11.150.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000
	Meningkatnya kinerja drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	92,20	94,36		95,92		97,48		99,04		100	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				11.150.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Drainase Perkotaan dalam k o n d i s i b a i k (Dengan Satuan:Sistem)	3	6		4		4		4		4	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
	Terehabitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	1	1000		500		500		500		500	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				8.450.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	18	6		4		4		4		4	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	10	5		5		5		5		5	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000
	Meningkatnya kepatuhan bangunan gedung	Rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten (Dengan Satuan:angka)	1	1		1		1		1		1	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Bangunan)	0	6		6		6		6		6	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Dengan Satuan:Bangunan Gedung)	2	1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				21.225.000.000		21.225.000.000		21.225.000.000		21.225.000.000		21.225.000.000
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	6	5		5		5		5		5	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200		200		200		200		200	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik (Dengan Satuan:Ha)	0	0		0,2		0,2		0,2		0,2	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dibangun/ditata (Dengan Satuan:Kawasan)	0	0		1		1		1		1	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				46.281.492.000		36.831.492.000		36.731.492.000		36.731.492.000		36.731.492.000
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:Km)	750.074	752.024		755.784		759.563		763.361		767.178	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				46.281.492.000		36.831.492.000		36.731.492.000		36.731.492.000		36.731.492.000
	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Km)	390.225	392.590		397.138		401.686		406.234		410.782	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Dengan Satuan:KM)	4,69	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan				15.825.000.000		15.825.000.000		15.825.000.000		15.825.000.000		15.825.000.000
	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	4,69	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan				7.006.492.000		7.006.492.000		7.006.492.000		7.006.492.000		7.006.492.000
	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Dengan Satuan:KM)	1,44	1,05		1,05		1,05		1,05		1,05	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar				2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000
	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Dengan Satuan:KM)	0,67	1,22		1,22		1,22		1,22		1,22	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Jembatan)	0	8		8		8		8		8	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan				3.500.000.000		3.400.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000
	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:KM)	0,4	1,17		1,13		1,1		1,1		1,1	
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan				16.350.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Dengan Satuan:Meter)	15	130,8		56		56		56		56	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih (Dengan Satuan:angka)	52,85	57,70		59,70		61,70		63,70		65,70	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga konstruksi (Dengan Satuan:Kali)	2	2		2		2		2		2	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	0	16		16		16		16		16	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang	100	120		100		100		100		100	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Dilatih (Dengan Satuan:Orang)											
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.486.500.000		1.627.120.000		1.586.500.000		1.586.500.000		1.686.500.000
	Meningkatnya kepatuhan penataan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:%)	0	70		75		80		85		90	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				641.500.000		641.500.000		341.500.000		341.500.000		341.500.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Tata Ruang (Dengan Satuan:dokumen)	3	3		3		3		3		3	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		0		0		0
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		0		0		0	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		0		0		0
	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		0		0		0	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				141.500.000		141.500.000		141.500.000		141.500.000		141.500.000
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Dengan Satuan:Laporan)	200	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				390.000.000		390.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3		3		3		3		3	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Dengan Satuan:Peta)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2		2		2		2		2	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	19		19		19		19		19	
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		0		0		0
	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2		2		0		0		0	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		345.000.000		345.000.000		345.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				60.000.000		60.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Dengan Satuan:Layanan)	0	600		600		600		600		600	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				10.000.000		10.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dengan Satuan:Sistem Informasi)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				255.000.000		395.620.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4		4		4		4		4	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0		140.620.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	5	0		1		1		1		1	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				30.000.000		30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Dengan Satuan:Laporan)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				25.000.000		25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR				0		0		0		0		100.000.000
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		0		0		0		1	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Capaian Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100	
2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota.				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1		1		1		1		1	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Meningkatnya penatagunaan tanah aset pemkab	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	100	98,42		98,83		99,23		99,62		99,89	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah pemkab bersertifikat (Dengan Satuan:Bidang)	100	20		20		20		20		20	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	100	1		1		1		1		1	
TOTAL:				184.881.930.709		139.166.047.218		139.152.004.891		143.439.822.141		140.729.517.564	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,70	77,00	77,30	77,60	77,90	78,20	78,50	IKU PD
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,6	4,6	4,61	4,61	4,62	4,62	4,62	IKU PD
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota*	%	88,25	89,83	90,27	90,72	91,16	91,6	92,05	IKU PD
4	Persentase capaian kinerja pengelolaan sumber daya air	%	NA	100	100	100	100	100	100	IKU PD
5	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	NA	92,08	92,09	92,1	92,11	92,12	92,13	IKU PD

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	57,51	19	29	39	49	60	70	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	43,79	27,68	36,74	45,81	54,87	63,94	73	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	97,11	97,23	97,36	97,48	97,60	97,73	97,85	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	92,26	92,42	92,58	92,73	92,89	93,05	93,2	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	5,79	10	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75	
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50,00	55,7	57,7	59,7	61,7	63,7	65,7	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan*	%	0	0,5	1	2	3	4	5	IKD
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten*	Angka	59,27	60,52	61,77	63,02	64,27	65,52	66,77	IKD
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	%	5,79	10	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00	IKD
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	20,22	22,5	25	30	35	43	45	IKD
5	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,3	42,67	44,05	46,76	IKD
6	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Angka	86,92	85,44	86,73	87,48	88,23	88,98	89,72	IKD
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak*	%	80,32	80,42	80,52	80,62	80,72	80,78	80,83	IKD
8	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota*	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	91,60	91,65	IKD

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan urusan pertanahan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan pekerjaan umum dan urusan pertanahan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.